

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP DAN LANDASAN TEORI

A. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terkait identitas kultural telah banyak dilakukan para ahli. Nengah Bawa Atmaja (2010) melakukan riset mendalam dengan menggunakan metode studi kasus beberapa desa di Bali, dan berita-berita kontemporer yang dimuat di berbagai media komunikasi kebudayaan. Penelitian itu dibukukan dalam buku berjudul “Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi”. Semua itu kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori sosial budaya yang mengarah pada teori kritis. Misalnya teori konsumsi, post struktural, teori globalisasi, teori post modernitas dan postmodern, dan teori multikulturalisme. Dengan menggunakan teori-teori tersebut, maka gejala sosial budaya yang tampak tidak sekedar dipaparkan secara naratif, tetapi disertai dengan dekonstruksi sehingga akar permasalahannya, yakni idiologi, permainan kekuasaan, dan hasrat baik yang tampak dapat dipahami secara utuh. Telaah terhadap masalah-masalah tersebut dirasa sangat penting tidak hanya untuk menambah pemahaman, tetapi dapat dikaitkan juga dengan munculnya gerakan *Ajeg Bali*--yaitu gerakan yang bermula sekitar 2007 yang lalu dan saat ini tampak semakin kuat. *Ajeg Bali* merupakan suatu gerakan masyarakat Bali telah mengalami pergolakan identitas yang memprihatinkan dari berbagai sendi kehidupan. Seperti keterjeratan masyarakat Bali pada politik tontonan yang mengakibatkan setiap barang yang mereka beli bukan hanya memiliki nilai guna konsumsi, tetapi harus pula dipertontonkan agar orang lain tahu siapa dirinya sebenarnya. Akibatnya masyarakat selain terjerat

budaya konsumerisme juga terjerat pada budaya tontonan (*a culture of spectacle*). Selain itu munculnya pergeseran pakem atau makna dibidang kesenian, berbagai budaya, pergaulan yang semakin bebas, maraknya penyakit masyarakat seperti perjudian yang dilakukan dengan terang-terangan, kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang semakin populer, dan lain sebagainya. *Ajeg Bali* dimaknai dalam tiga tataran. Pada tataran individu, *Ajeg Bali* dimaknai sebagai kemampuan manusia Bali untuk memiliki kepercayaan diri kultural (*cultural confidence*), sifatnya kreatif dan tidak membatasi diri dan hal-hal yang bersifat fisik semata. Pada tataran lingkungan kultural, *Ajeg Bali* dimaknai sebagai terciptanya sebuah ruang hidup budaya Bali yang bersifat inklusif, multikultural dan selektif terhadap pengaruh luar. Pada tataran proses kultural, *Ajeg Bali* diartikan sebagai interaksi manusia Bali dengan ruang hidup budaya Bali guna melahirkan produk-produk atau penanda-penanda budaya baru melalui sebuah proses yang berdasarkan nilai-nilai kultural dan kearifan lokal serta memiliki kesadaran ruang (*spatial*) serta waktu yang mendalam.

Beberapa hasil dari penelitian ini, masyarakat Bali kini telah mengalami pergolakan identitas. Kebudayaan Bali yang adiluhung perlahan-lahan terkikis oleh arus modernisasi dan westernisasi yang mengoyak jantung kehidupan masyarakatnya. Kajian ini dimulai dengan problem pembangunanisme dan globalisasi yang menjadi latar belakang perubahan sosial masyarakat pada Bali, agama pasar, masyarakat Bali yang dilanda sindrome konsumsi akut, dekadensi moralitas, hingga konflik kekerasan antar sesama orang Bali yang dipicu oleh perebutan sumber ekonomi serta perbedaan memaknai tradisi. Berkenaan dengan hal itu, buku ini memiliki misi utama untuk mendapatkan gambaran yang

sistematik, luas, dalam, dan holistik tentang gerakan kultural *Ajeg Bali* dalam konteks bukan sebagai gerakan yang diadakan melainkan gerakan yang memiliki latar belakang yang terkait dengan berbagai dampak yang tidak diinginkan dari modernisasi maupun globalisasi. Namun buku ini belum menyentuh secara substansial tentang strategi kebudayaan dalam rangka mewujudkan desain *Ajeg Bali*.

Berpijak dari penelitian tersebut, diharapkan muncul berbagai temuan dari pengaruh globalisasi, apakah akan berbeda atau bahkan sama dengan pengaruh globalisasi di Bali atau di tempat lainnya. Selain itu penelitian di Krajangkulon ini menitik beratkan pada peran adat kebiasaan masyarakatnya sebagai salah satu ciri khas dari budaya santri.

Arab Naz dkk (2011:4) dalam jurnal *International of Academic research in Business and Social Sciences* dengan judul “*The Crises Of Identity: Globalization And Its Impacts On Socio-Cultural and Psychological Identity Among Pakhtuns Of Khyber Pakhtunkhwa Pakistan*”. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian globalisasi dan konsekuensi sosio-budaya dan identitas psikologi dikalangan masyarakat Pakhtun Malakand, Propinsi Khyber Pakhtunkhwa Pakistan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 100 pengajar (dosen) yang dipilih dari dua lapisan atau strata (tiga universitas dan delapan perguruan tinggi) dari bagian Malakand. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan menggunakan teknik random sampling (metode proporsional). Data dianalisis secara statistik dan *chi-square test* yang digunakan untuk menilai hubungan antara globalisasi dan konsekuensinya pada sosio-budaya dan krisis identitas psikologi dalam budaya Pakhtuns. Analisis kuantitatif dilakukan untuk membuktikan hipotesis bahwa

globalisasi menyebabkan krisis identitas dibidang budaya, agama dan psikologi pada masyarakat Pakhtun. *Chi-squer* dan analisis Gamma digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara globalisasi dan krisis budaya, serta agama dan identitas psikologis. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa globalisasi telah menciptakan berbagai budaya, agama dan krisis identitas psikologis termasuk imperialisme budaya dan pluralisme, perubahan struktur sosial tradisional, dorongan dari sekularisasi, penurunan solidaritas sosial dan menciptakan kompleksitas dalam hubungan sosial.

Secara metodologi, penelitian ini berbeda dengan apa yang menjadi fokus penulis. Dengan menggunakan metode kuantitatif penelitian ini berusaha membuktikan hipotesis dengan mencari keabsahan data statistiknya.

Dengan mensintesis apa yang telah ada, penulis berusaha untuk mengambil variabel-variabel yang belum tersentuh oleh penelitian ini. Salah satunya adalah adat kebiasaan masyarakat Krajankulon diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk kontribusi pengembangan dakwah yang ada di daerah ini, sebagai desain untuk mewujudkan masyarakat yang ideal.

Selanjutnya buku kajian Islam lokal karya Nur Syam (2005) dengan judul “Islam Pesisir”. Penelitian ini merupakan disertasi yang berhasil dipertahankan di Universitas Air Langga Surabaya. Obyek kajiannya dilakukan di wilayah pesisir utara Tuban, tepatnya di desa Palang. Secara geografis Kecamatan Palang terbelah menjadi dua yaitu: wilayah barat dengan religio-kultural NU dan sebelah timur dengan religio-kultural Muhammadiyah. Dengan kajian etnografi tampak jelas bagaimana masyarakat pesisir melakukan berbagai upacara seperti upacara lingkungan hidup, kalenderikal, upacara tolak balak, maupun upacara-upacara hari

baik. Dalam berbagai upacara, sangat terlihat jelas peran adat-kebiasaan yang dilakukan masyarakat desa Palang dalam mempertahankan identitasnya. Adat-kebiasaan tersebut hakekatnya bertumpu pada medan budaya, makam, sumur, dan masjid. *Masjid* ialah tempat bertemunya kegiatan ritual ibadah kepada Allah, terutama yang terkait dengan ritual shalat lima waktu atau shalat jum'at, disamping kegiatan keislaman lainnya, seperti peringatan hari besar Islam, dan pengajian-pengajian keislaman. Bahkan di tempat inilah orang NU dan Muhammadiyah dapat bertemu dalam suatu kepentingan. Sedangkan *makam atau kuburan* adalah lokus bertemunya tradisi *manganan* yang dilakukan oleh wong abangan dan NU. Meskipun keduanya memiliki maksud dan tujuan yang berbeda, akan tetapi bisa bertemu didalam medan budaya ini. *Sumur* juga merupakan medan budaya yang mempertemukan antara *wong* abangan dan *wong* NU dalam suatu kegiatan *nyadran* atau sedekah bumi. Medan budaya dapat mempertemukan berbagai varian didalam penggolongan sosio-religius dan menjadi medan interaksi sebagai wadah untuk transformasi, legitimasi dan habituaisasi. Didalam setiap upacara yang diselenggarakan, akan tampak adanya sesuatu yang dianggap sakral, suci, yang berbeda dengan yang alami, empiris, atau yang profan. Diantara ciri-ciri yang sakral itu adalah adanya keyakinan ritus, misteri dan supernatural.

Dengan menggunakan teori konstruksi sosial, penelitian ini berusaha menjawab persoalan sosiologi pengetahuan seperti bagaimana proses terkonstruksinya realitas dalam benak individu, dan bagaimanakah sebuah pengetahuan dapat terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Di dalam konteks realitas sosial, konstruksi sosial dapat dipakai untuk melihat bagaimana proses pelebagaan berbagai kegiatan ritual di dalam masyarakat. Upacara keagamaan

adalah hasil konstruksi sosial masyarakat lokal didalam konteks sosio-religio-kultural, sehingga jika terdapat deferensiasi di dalam masyarakat itu maka akan terdapat kemungkinan terjadinya variasi-variasi didalam melakukan upacaranya. Dengan menggunakan konsep Peter L Berger, tentang kebudayaan merupakan konstruksi manusia, dan agama sebagai bagian dari sistem kebudayaan juga merupakan konstruksi manusia. Artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan antar manusia, masyarakat dan agama, yaitu agama sebagai sesuatu yang obyektif karena agama berada di luar diri manusia, atau agama mengalami proses obyektivikasi, seperti ketika agama berada di dalam teks atau menjadi tata nialai, hukum, aturan dan sebagainya. Teks atau doktrin itu mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu sehingga menjadi kenyataan subyektif dan agama menjadi bagian tak terpisahkandari individu karena agama telah diinterpretasikan oleh manusia untuk menjadi pedomannya atau agama mengalami internalisasi. Akan tetapi agama juga mengalami proses eksternalisasi, yaitu ketika agama menjadi norma atau tata nilai yang berfungsi mengontrol tindakan masyarakat.

Penelitian ini memiliki satu persamaan yaitu obyek kajiannya berada di wilayah pesisir meski berbeda secara administratif. Selain itu berbagai adat kebiasaan yang menjadi ritual dalam kehidupan sehari-hari menjadi kajian utamanya. Namun penelitian ini lebih terfokus pada transformasi budaya dari tradisi lokal menjadi Islam lokal yang didasarkan pada penggolongan sosio-religius. Untuk mensintesis maka penelitian di Krajangkulon mengambil aspek identitas masyarakat pesisir dengan berbagai adat-kebiasaannya yang akan memberikan kontribusi pada bidang garapan dakwah di masyarakat pesisir.

Kemudian tesis Ibnu Fikri dengan judul “Dakwah Jaringan Islam Liberal: Studi tentang Pergumulan dan Pergeseran Konsep Dakwah Era Reformasi”. Tesis ini memfokuskan pada Jaringan Islam liberal (JIL) yang merupakan salah satu gerakan dakwah Islam di tengah maraknya pendekatan dakwah di era reformasi. Berbagai karakteristik pemahaman keislaman masyarakat Indonesia yang berbeda-beda inilah yang melatarbelakangi terbentuknya JIL. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tesis ini menggunakan metode pengumpulan data dari dua sumber yaitu sumber primer diperoleh dari mengumpulkan dokumen-dokumen resmi berupa *booklet* (buku saku), *website* serta buku-buku yang dipublikasikan, maupun wawancara dengan tokoh-tokoh yang sudah ditentukan sebagai *key-person*. Sedangkan data sekundernya menggunakan berbagai artikel di media massa dan hasil wawancara dengan pengamat. Dalam pengumpulan data baik primer maupun sekunder penulis menggunakan beberapa teknik. Diantaranya teknik dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis diskriptif yang bersifat eksploratif. Sedangkan pendekatannya menggunakan analisis yang didasarkan pada teori-teori dakwah.

Dengan upaya eksplorasi secara mendalam pada realitas dakwah yang dilakukan JIL terhadap pergumulan dan pergeseran dakwah, dapat diambil kesimpulan bahwa, era reformasi yang terjadi di Indonesia telah menjadi titik pangkal perubahan, tidak hanya dalam konteks sosial, politik, ekonomi maupun sosial budaya tetapi terjadi pada konsepsi keberagamaan. Fenomena yang terakhir ini ditandai dengan maraknya kebebasan berekspresi dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan tanpa rasa takut, sebagaimana yang pernah terjadi pada Orde

Baru berkuasa. Sehingga muncul berbagai ekspresi keagamaan yang dilakukan umat Islam yang cenderung disalahfungsikan yaitu maraknya tindakan radikalisme yang mengarah pada tindakan anarkhis, destruktif hingga diskriminatif.

Sebagian umat Islam yang berideologi liberal berusaha mengedepankan konsepsi-konsepsi ajaran agama yang lebih simpatik. Mereka mengedepankan kritik dan rekonstruksi pemahaman yang selama ini dianggap menjadi pemicu kemunduran Islam. Konsep keberagaman inilah yang kemudian memotivasi para intelektual kritis muda untuk membentuk jaringan. Dakwah yang dilakukan jaringan ini adalah dakwah *bil-qalam*, menulis berbagai topik Islam liberal yang dipublikasikan beberapa media massa nasional maupun daerah, penerbitan buku-buku keislaman, *talk show* di radio swasta maupun *website* dengan alamat www.islamlib.com. Munculnya gerakan dakwah baru yang dikembangkan oleh JIL disatu sisi telah menggugah konsepsi dakwah yang selama ini cenderung bersifat konservatif dengan cara-cara konseptual, monoton dan tekstual. Di sisi lain implementasi gerakan dakwah yang menjadi bidang garap JIL menambah khazanah strategi serta metode dakwah dalam skala praktis. Sehingga pola gerakan dakwah seperti ini merupakan langkah baru dalam pengembangan keilmuan dakwah.

Keempat penelitian di atas, jika dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis kerjakan memiliki persamaan dan perbedaan. Penelitian yang penulis kerjakan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya. Secara otomatis, metode yang digunakan juga terdapat kesamaan, misalnya sumber data dari lapangan, teknik pengumpulan data. Secara substansi penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya,

meskipun dalam konteks lokasi yang berbeda. Maka secara antropologis tentu akan memiliki kekhasan tersendiri. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini akan memperkaya, dan menyempurnakan penelitian sebelumnya. Tetapi tema adat kebiasaan berkontribusi pada dakwah dalam konteks globalisasi, tampaknya menjadi hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya.

B. KONSEP

Konsep merupakan penyederhanaan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kajian. Selain itu konsep dapat diartikan sebagai hasil abstraksi dan sintesis teori yang dikaitkan dengan masalah penelitian yang dihadapi, dalam rangka menjawab dan memecahkan masalah penelitian. Konsep dapat berfungsi untuk menyederhanakan arti atau pemikiran, ide serta hal-hal atau gejala sosial yang digunakan agar pembaca dapat memahami maksudnya sesuai dengan keinginan peneliti dalam penggunaan konsep tersebut (Koentjaraningrat, 1986: 227). Selain itu konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena yang serupa kenyataannya. Konsep memiliki tingkat generalisasi yang berbeda, semakin dekat suatu konsep kepada realitas maka semakin mudah konsep tersebut diukur. Konsep merupakan deskripsi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala.

Oleh sebab itu dalam kajian ini, berbagai hal yang penulis anggap signifikan, akan penulis uraikan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Konsep-konsep yang akan penulis uraikan diantaranya tentang globalisasi, identitas kultural, adat-kebiasaan dan dakwah Islamiyah.

1. Globalisasi

Menurut Sitomurang dalam Sujarwa,(2010:46-47) globalisasi merupakan *catch- phrase* , sebuah istilah “ngetren” yang frekwensi pemakaiannya di Indonesia sebanding dengan tulisan *made to order* , yang banyak menghiasi bangunan di Pulau Bali. Globalisasi adalah pengindonesiaan dari kata “globalization” berasal dari kata “globe” yang berarti bola bumi, sedangkan akhiran “sasi” mengandung pengertian “proses” atau keadaan yang sedang berjalan atau terjadi saat ini. Atau bermakna “proses pbumian sesuatu”. Kata “sesuatu” tersebut berkaitan dengan masalah ekonomi dan kapitalisme yang populer diseluruh dunia pada masa kapitalisme akhir yaitu pada satu atau dua dekade terakhir. Globalisasi ekonomi merupakan *eufemisme made in wall st. USA* untuk mengganti vulgarisme istilah “konsumerisme internasional” yang tidak sesuai dengan etika *public relation* para kapitalis Amerika dan Eropa Barat.

J.A. Scholte (2000:17) memaknai globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi khususnya Amerikanisasi (*globalization as westernization or modernization, especially in an ‘Americanized’ from*). Globalisasi dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah dinamika, dimana struktur sosial modernitas -- kapitalisme, rasionalisme, birokratisme, dan lain-lain-- disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Prosesnya cenderung merusak budaya setempat yang telah mapan serta merampas hak menentukan sendiri masyarakat setempat. Sementara itu, David Handerson dalam Wolf (2004: 16-17) mendefinisikan globalisasi sebagai pergerakan bebas barang, jasa, buruh, dan modal, sehingga menciptakan satu pasar tunggal dalam hal masukan dan keluaran dan perlakuan bersifat nasional terhadap investor asing --serta warga nasional yang bekerja di luar negeri-- sehingga dari segi ekonomi tidak ada orang asing.

Mc Luhan dan Bruce memaknai globalisasi dengan “global village” peningkatan kesadaran dunia yang satu (*world is one*) atau terciptanya homogenitas dunia sebagai akibat dari kesuksesan sistem komunikasi secara keseluruhan dalam kampung dunia. Saat ini betapa mudahnya orang melakukan komunikasi jarak jauh, tidak hanya antar kota tetapi antar negara yang lokasinya berjauhan. Bahkan saat ini banyak para pejabat yang mengadakan pertemuan dengan staf pembantunya melalui *teleconference* dengan maksud untuk memantau keadaan atau situasi dalam negeri. Demikian pula komunikasi dapat dilakukan dengan media internet dalam waktu relatif singkat diperoleh informasi atau berita-berita aktual yang terjadi di berbagai penjuru dunia.

Awal mula era globalisasi sendiri masih diperdebatkan. Setidaknya ada tiga pendapat mengenai kapan globalisasi muncul. Menurut Balaam sebagaimana yang dikutip Safril Mubah (2011: 303), globalisasi yang pertama dimulai masa awal merkantilisme sekitar abad ke-16 hingga ke-17. Era ini setidaknya ditandai oleh peristiwa penting, yaitu kelahiran *nation-state* pasca perjanjian *Westphalia*. Dengan kelahiran negara baru ini, tentu saja kemantapan negara menjadi sesuatu yang niscaya. Padahal kondisi saat itu, negara-negara baru menerapkan proteksionisme yang ketat. Karena itu, interaksi ekonomi antara negara satu dengan yang lainnya menjadi semakin sulit. Hal ini yang kemudian memunculkan konsep baru yang disebut kolonialisme dan imperialism. Masa ini muncul dengan semboyan *gold, gospel, dan glory*. Negara-negara baru tersebut yang membutuhkan suntikan pemasukan ekonomi mencari wilayah-wilayah lain di luar wilayah mereka untuk dijadikan tambang emas. Namun, selain mencari emas, mereka juga membawa misi lain yaitu menyebarkan agama (secara luas bisa

diartikan kebudayaan) dan juga kejayaan negara mereka. Perjalanan melampaui negara ini oleh beberapa pakar dinilai sebagai awal globalisasi.

Pendapat kedua adalah masa sekitar tahun 1970-an. Pada masa ini, interdependensi ekonomi antara negara satu dengan negara yang lain semakin terasa. Perpindahan uang dari negara satu ke negara yang lain semakin cepat. Menariknya, tidak seperti hukum ekonomi, komoditi yang diperdagangkan pada masa ini adalah uang itu sendiri. Perdagangan yang berjalan hanya melalui komputer. Masa inilah yang sering pula disebut dengan masa pasar saham. Perkembangan ekonomi yang semakin canggih ini ternyata berkaitan erat dengan bidang-bidang kehidupan lainnya. Salah satu persyaratan dalam masa ini adalah adanya liberalisasi di setiap bidang. Tanpa adanya liberalisasi, suatu negara akan terkucil dari pergaulan internasional dan akan mengalami kesulitan-kesulitan tersendiri. Implikasinya, liberalisasi ini akan mengubah sistem politik suatu negara dan juga karakter masyarakatnya. Masa liberalisasi ini yang disebut sebagai masa awal globalisasi.

Pendapat ketiga adalah masa ketika internet mulai berkembang pada 1990-an. Melalui internet, transaksi belanja antara satu orang dengan perusahaan lain di belahan negara manapun dapat terjadi. Melalui internet pula, arus informasi dan komunikasi semakin tidak terbandung. Internet dapat pula mempengaruhi kebijakan politik suatu negara. Pendek kata, internet dapat meminimalisasi – bahkan menghapuskan- peran negara (Scholte 2001). Perkembangan yang semakin canggih ini membuat dunia seakan menjadi sesuatu yang homogen . Begitu pula dengan *shared values* yang ada di masyarakat. Masa internet inilah yang oleh beberapa pakar dinilai sebagai awal globalisasi yang nyata.

Sejalan dengan perkembangan itu, muncul berbagai problematika dari dampak meluasnya nilai-nilai global yang semakin rumit sesuai perkembangan zamannya. Nilai-nilai global tersebut dapat dilihat dari lima dimensi pokok dalam globalisasi yaitu:

1. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi merupakan penggerak dari globalisasi, karena globalisasi selalu ditandai dengan perdagangan bebas. Berbagai arus barang, jasa, modal, teknologi, budaya, dan sumber daya manusia menembus batas-batas ruang dan waktu suatu negara. Hal ini disebabkan karena arus globalisasi bergerak bebas tanpa negara harus mengatur dan mengelola berbagai komoditi yang dapat masuk secara optimal sebagai bagian penting dari daya saing negara tersebut.

Menurut Subroto (2011) mekanisme ini dapat terlaksana dengan adanya kerjasama ekonomi baik dalam tingkatan bilateral, regional maupun international. Bentuk-bentuk kerjasama dapat terlaksana jika saling menguntungkan (*mutual benefit*) dan keterbukaan (*openness*) diantara negara yang terlibat dalam kerjasama ekonomi. Dengan semakin menguatnya sistem perdagangan dan pasar bebas dunia di era globalisasi, kerjasama ekonomi (*economic corporation*) mutlak diikuti oleh setiap negara yang maju menjadi pemain di dalam tatanan baru ekonomi dunia.

2. Dimensi teknologi

Globalisasi hadir dengan ditopang teknologi secara massif ke seluruh dunia. Kemajuan teknologi khususnya dibidang teknologi informasi,

selalu diikuti dengan inovasi-inovasi baru membawa dampak yang sangat luas. Siapapun dapat mengakses berbagai informasi tiada batas tanpa ada sistem sensor atau filterisasi. Bahkan kemajuan bidang teknologi informasi ini telah menciptakan berbagai alat komunikasi yang *handy* (kecil dan dapat dibawa kemana-mana) seperti laptop, tablet, smart phone dll, yang semuanya mampu mengakses internet dan informasi lainnya dengan privasi yang sangat longgar dan tak terbatas. Artinya kemajuan dunia teknologi ini muncul selalu dengan dialektika. Teknologi hadir dan didesain untuk memberi banyak manfaat bagi manusia. Namun jika manusia menggunakan untuk kepentingan yang negatif maka teknologi muncul bagaikan sebuah pisau. Pisau diciptakan untuk memberikan manfaat pada bagi penggunanya, akan tetapi dilain pihak pisau dapat digunakan untuk membunuh orang lain bahkan orang yang menciptakanya.

3. Dimensi Politik.

Meskipun globalisasi lebih banyak diwarnai oleh aktifitas ekonomi seperti; perdagangan bebas, pasar bersama, kerjasama ekonomi maupun integrasi ekonomi, tetapi bukan berarti peranan politik semakin tidak berarti. Justru perdagangan bebas adalah akibat dari keputusan politik yang dibuat oleh para pemimpin negara-negara yang terlibat dalam aliansi ekonomi, sehingga tidak ada kerjasama ekonomi global tanpa diawali oleh keputusan politik. Krisis moneter yang pernah dialami negara Indonesia diawal tahun 1997 misalnya, telah membawa dampak luas pada perubahan pola pikir masyarakat

Indonesia, bergeser menuju pola pikir bangsa barat, terutama pada perilaku politiknya (suryorini, 2006:91). Besarnya pengaruh politik ini sehingga banyak permasalahan di Indonesia selalu diselesaikan secara politis dan meninggalkan asas profesionalisme, dimana setiap masalah harus diselesaikan oleh ahlinya dan bukan dengan cara politis semata. Sehingga efek yang muncul kemudian masyarakat ikut mempolitisi setiap kasus yang dihadapi terutama yang berkaitan dengan pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

4. Dimensi Kebudayaan.

Jika kebudayaan diartikan sebagai sesuatu yang dipelajari dan sarana mekanisme adaptasi yang diwariskan secara turun temurun maka kebudayaan menyangkut aspek-aspek: pengetahuan, seni, moral, kepercayaan, hukum, adat istiadat dan segala kebiasaan sebagai anggota masyarakat. Di era globalisasi, terpaan informasi sangat memungkinkan seseorang mengadopsi nilai-nilai pengetahuan dan kebiasaan di luar lingkungan sosialnya yang jauh dari jangkauan fisiknya. Proses enkulturasi, akulturasi maupun imitasi tidak selalu dilakukan oleh orang tua atau orang-orang yang dekat dengan mereka. Karena proses ini dapat dilakukan oleh media massa dan dapat menjadi perilaku global.

Nilai-nilai global tersebut, semakin mempengaruhi kehidupan masyarakat di dunia, tak terkecuali dalam kehidupan sosiokultural. Budaya global yang bersifat homogen secara perlahan menggantikan lokal dan nasional, sehingga jati diri suatu bangsa dapat tergeser dengan sendirinya. Nilai-nilai budaya lokal seperti

upacara adat, musik tradisional, kesenian lokal, atau makanan khas daerah makin tidak diminati oleh mayoritas masyarakat. Globalisasi mampu mengubah pandangan hidup masyarakat, bahkan ideologi sekalipun.

teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai pelopor yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem lokal dan nasional itu, proses globalisasi melaju begitu cepat menuju suatu sistem integrasi dari sistem-sistem lokal menjadi satu yaitu sistem global (Rachbini dalam Paul Hirs pada Pengantar edisi Indonesia, 2001:vii). Dunia sebagaimana dalam bahasa Mc. Luhan menjadi “global village”, yang menyatu, saling tahu dan terbuka serta saling tergantung satu sama lain.

Proses itu berlangsung secara terus-menerus tanpa ada kendali. Namun proses globalisasi tidak berjalan mulus sebagaimana yang diinginkan. Dua bidang yang pada awalnya menurut Rachbini (Hirs, 2001:vii), telah berinteraksi intens dengan masyarakat dunia adalah teknologi dan sistem ekonomi. Sebelum proses keduanya mengalami perkembangan secara cepat dan mapan, sistem teknologi berbenturan dengan nilai-nilai moral, khususnya dampak internet. Sedangkan sistem ekonomi dan keuangan dunia dengan pesat menjadi global, tetapi dengan cepat pula tersandung pada krisis keuangan Asia (Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina Korea Selatan, dan bahkan Jepang) yang diperkirakan membawa masalah ekonomi bagi kawasan di luar Asia-Amerika Utara (AS dan Canada) maupun Eropa. Jan Aart Scholte (2001) sebagaimana yang dikutip Safril Mubah (2011: 303), mengamati proses globalisasi melalui lima indikator: (1) internasionalisasi,

(2) liberalisasi ekonomi, (3) westernisasi, (4) demokratisasi, dan (5) deteritorialisasi.

Internasionalisasi mengacu pada kejadian di suatu wilayah yang dapat mempengaruhi kejadian di wilayah lainnya. Pada intinya, konsep ini lebih menekankan kepada konsep informasi dan kedekatan antara elemen-elemen masyarakat. Sementara, liberalisasi ekonomi menekankan adanya integrasi ekonomi dan pasar keuangan global. Westernisasi merupakan pendifusian nilai-nilai Barat ke dalam nilai-nilai lokal. Hal ini diindikasikan dengan mulai mudarnya budaya lokal dan kecenderungan homogenitas budaya dunia. Demokratisasi merupakan bentuk dari kebebasan dalam berbagai alternatif politik dalam kompetisi yang bebas diantara aktor-aktor politik tanpa membedakan preferensi mereka. Deteritorialisasi mengacu kepada mudarnya peran negara sebagai aktor. Mudarnya peran itu terutama berpengaruh terhadap kebebasan individu. Individu yang bebas berinteraksi dan melakukan tindakan apapun tentu akan lebih memudahkan masuknya pengaruh dari luar.

Begitu dahsyatnya dampak yang ditimbulkan dari proses-proses globalisasi yang harus ditanggung oleh negara-negara di berbagai belahan dunia. Bagaimanakah proses globalisasi sehingga hampir tidak satupun negara yang luput dari jangkauannya? Menurut Rosenau sebagaimana yang dikutip oleh Tjiptosubroto (2013:6) proses-proses globalisasi dapat diidentifikasi dalam lima sumber yaitu:

- a) Diakibatkan oleh dinamika teknologi yang mengurangi jarak global, serta gerakan manusia yang serba cepat. Disini peran media menjadi pangkal dalam mengemas suatu pesan yang akan dikomunikasikan ke seluruh dunia.

- b) Globalisasi muncul dari masalah-masalah bumi, misalnya : masalah lingkungan, masalah penanggulangan terhadap dampak dari rumah kaca, masalah kependudukan, masalah sosial ekonomi, dan lain-lain.
- c) Proses globalisasi sebagai akibat dari kemampuan negara dalam memecahkan masalah nasionalnya, misalnya : munculnya berbagai terorisme, berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain.
- d) Munculnya sub-sub kelompok yang semakin kuat dalam masyarakat bangsa, misalnya lahirnya jenis dan bentuk NGO (*Non Governmental Organization*) yang bergerak di bidang : HAM, demokrasi, hukum dan lain-lain.
- e) Globalisasi sebagai akibat meningkatnya keahlian, pendidikan, dan keberdayaan reflektif warga negara. Sehingga mampu melihat masalah-masalah di luar batas negaranya, misalnya: rasa solidaritas bencana alam, rasa senasib dan sepenanggungan yang dialami bangsa lain, dan lain-lain.

Proses globalisasi di atas akan terus berlangsung dan berkembang dengan ditopang oleh saluran-saluran yang mendukung eksistensinya. Saluran-saluran globalisasi tersebut diantaranya:

a. Sistem komunikasi dan alat transportasi.

Dewasa ini sistem komunikasi melalui satelit sangat memudahkan setiap orang berhubungan dengan orang lain di negara yang berbeda. Demikian pula dengan alat transportasi yang modern, cepat dan lancar sangat memudahkan dan memungkinkan orang melakukan perjalanan ke negara lain, atau ke belahan bumi yang lain dengan mudah, dan waktunya pun relatif dapat diatur sesuai yang diinginkan. Kemajuan sistem komunikasi dan alat transportasi yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah menguatkan

anggapan bahwa, batas-batas wilayah geografis suatu negara tidak begitu penting lagi bagi banyak orang, apalagi yang telah terbiasa memanfaatkan jasa komunikasi dan transportasi di era modern ini.

b. Perdagangan internasional.

Era globalisasi dalam bidang perdagangan dan industri telah melahirkan era baru, yaitu era pasar bebas. Setiap negara tentu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan transaksi perdagangan dengan negara-negara lain. Era pasar bebas sekaligus menandai kebebasan kontak perdagangan dengan negara manapun yang dilandasi prinsip-prinsip saling menguntungkan, tanpa adanya hambatan-hambatan batas wilayah negara dan peraturan-peraturan dari masing-masing negara yang dapat merugikan sistem perdagangan internasional.

c. Pariwisata internasional.

Dewasa ini dunia pariwisata telah menjadi industri yang sangat potensial untuk mendatangkan devisa negara. Oleh sebab itu hampir setiap negara berlomba-lomba untuk menggali potensi pariwisatanya baik berupa pariwisata alam dan lingkungan maupun pariwisata budaya. Di samping itu penambahan fasilitas berupa kemudahan komunikasi dan transportasi maupun peningkatan kebersihan, keindahan serta keramah-tamahan terus diupayakan agar dapat menarik para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

d. Migrasi internasional.

Sesungguhnya perpindahan penduduk atau migrasi dari suatu negara ke negara lain dapat terjadi karena beberapa sebab, misalnya : peperangan, bencana alam, tekanan politik, perbedaan ideologi atau karena pekerjaan. Tetapi dewasa ini terjadinya migrasi banyak disebabkan oleh tuntutan pekerjaan. Orang-orang

yang memiliki spesialisasi dan keahlian yang tinggi di bidangnya, cenderung untuk bekerja di negara-negara yang maju dan modern. Karena dapat memberikan fasilitas yang baik untuk menunjang keahliannya juga dapat memberikan kesejahteraan hidup yang memadai. Tetapi ada juga tenaga kerja yang tidak terampil dan mencari pekerjaan di negara lain yang membutuhkan tenaga kerja yang murah, karena tenaga kerja seperti itu belum tentu ada di negara yang didatangi. Sehingga sebagai alternatif terakhir mereka harus membuka batas-batas negaranya terhadap warga negara asing tersebut. Biasanya tenaga kerja murah tersebut datang dari negara-negara berkembang yang karena berbagai keterbatasan warganya tidak dapat memasuki struktur pekerjaan yang sedang dibutuhkan oleh sektor industri. Mereka menjadi tersisih dan pergi ke negara lain untuk mencari pekerjaan sebagai tenaga kerja. Akibat yang harus diterima adalah mendapatkan upah murah dan menjadi tenaga kerja tidak terampil di negara lain.

e. Kerjasama antar negara.

Di era globalisasi, hampir tidak ada satu negarapun di dunia ini yang bisa hidup tanpa kerjasama dengan negara lain, meskipun negara itu tergolong negara maju dan modern sekalipun. Kerjasama antar negara sudah menjadi suatu kebutuhan, karena setiap negara memiliki kekurangan di bidang tertentu. Kekurangan tersebut dapat dipenuhi oleh negara lain yang mempunyai kelebihan dari apa yang dibutuhkan dan sebaliknya.

f. Media massa.

Keberadaan mass media baik cetak maupun elektronik dalam proses globalisasi memegang peranan yang amat penting sebagai saluran utamanya. Semakin

canggihnya teknologi percetakan jarak jauh dan kecepatan komunikasi elektronik telah mampu menembus batas-batas wilayah negara. Dunia televisi yang menjadi bagian dari media elektronik yang paling menonjol peranannya telah masuk dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dunia. Program-program tayangan televisi mampu mempengaruhi kebudayaan masyarakat bahkan dalam hal-hal tertentu mampu mengubah perilaku masyarakat yang sudah terpolakan sekalipun.

2. Identitas Kultural

Dalam *Webster NewWorld Dictionary* (1996:699), identitas memiliki makna diantaranya: (1) Membuat sesuatu menjadi identik atau sama, misalnya mempertimbangkan sesuatu itu sama, artinya dengan melihat peluang (mengidentifikasi satu minat dibanding dengan minat yang lain); (2) Mengakui keberadaan sesuatu yang dilihat, diketahui, digambarkan atau yang kita klaim apakah dia manusia atau benda (mengidentifikasi sebuah spesimen biologis); (3) Menghubungkan atau membuat sesuatu menjadi lebih dekat (mengidentifikasi pikiran seseorang dengan mazhab yang mempengaruhi dia); (4) Kaum psikoanalisis menggunakan istilah *identify* untuk menerangkan rincian aspek-aspek psikologis yang dimiliki seseorang dan membandingkannya dengan aspek-aspek psikologis yang dimiliki orang lain; (5) Meletakkan seseorang kedalam tempat orang lain, sekurang-kurangnya meletakkan atau mempertukarkan pikiran, perasaan, masalah, dan rasa simpatik (empati).

Pengertian identitas pada tataran hubungan antar manusia akan

mengantarkan kita untuk memahami sesuatu yang lebih konseptual (Liliweri, 2002: 69-70). Pada dataran inilah, identitas harus dipahami sebagai cara mengidentifikasi (melalui pemahaman terhadap identitas) atau merinci sesuatu yang dilihat, didengar, diketahui, atau yang digambarkan, termasuk mengidentifikasi sebuah spesimen biologis (merinci ciri atau karakteristik fisik) bahkan mengidentifikasi pikiran seseorang dengan mazhab yang mempengaruhi, dan merinci aspek-aspek psikologis.

Menurut Rummens (1993: 157-159) identitas adalah karakter khas yang dimiliki setiap individu, atau kelompok dalam kategori sosial tertentu. Menurut Horowitz sebagaimana dikutip Arab Naz dkk (2011), menyatakan bahwa identitas budaya adalah identitas yang dimiliki suatu kelompok atau individu, yang dipengaruhi budaya seseorang maupun kelompok dan terkait dengan wilayah geografis yang berhubungan dengan ciri-ciri seperti bahasa, budaya agama, dan sifat-sifat lainnya. Identitas adalah suatu sistem sosial yang bekerja seperti sistem organik dan terdiri dari nilai-nilai struktur, budaya, aturan, membangun kepercayaan dan praktik-praktik yang anggotanya diharapkan untuk menyesuaikan diri. Dalam pandangan Deng, identitas budaya menjawab pertanyaan "Siapakah aku?" atau "Anda berasal dari mana?" Artinya dibalik pertanyaan itu ada keyakinan bahwa setiap orang memiliki "asal" , atau "Dimana kita akan "dan"? Apa yang kita miliki "? Pertanyaan itu ada karena orang mengkonstruksi identitas mereka melalui budaya mereka, mereka akan membela mereka. Faktanya adalah jelas bahwa identitas budaya dan globalisasi yang berkorelasi dan saling berhubungan

dengan fenomena hari ini. Globalisasi merupakan sumber transformasi ide-ide baru dan modern, pengembangan sumber daya manusia dan informasi, tapi di sisi lain itu adalah ancaman bagi sosial-budaya lingkungan dalam konteks identitas.

Dalam arti yang sederhana sebagaimana yang diungkapkan Liliweri (2002: 72) identitas budaya adalah rincian karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang diketahui batas-batasnya ketika dibandingkan dengan karakteristik kebudayaan orang lain. Ini artinya ketika kita akan menetapkan atau mengetahui identitas budaya kita, maka tidak sekedar menentukan ciri biologis semata tetapi tatanan berfikir, perasaan/cara merasa dan cara bertindak atau motivasi tindakan. Menurut Kenneth Burke sebagaimana yang dikutip Liliweri, untuk menentukan identitas budaya sangat tergantung pada “bahasa” (bahasa sebagai unsur kebudayaan non material). Karena bahasa menjelaskan sebuah kenyataan atas semua identitas yang dirinci kemudian baru dibandingkan untuk mengetahui suatu maksud baik secara denotatif maupun konotatif.

Lisa Orr dalam Liliweri (2002: 73-74) menegaskan bahwa untuk mengetahui identitas orang lain--pada awal berkomunikasi—merupakan pengungkapan yang paling sulit apalagi jika kita berkeinginan mengetahui kebudayaan otentik dari orang lain. Artinya pada umumnya manusia tidak suka mengenal identitas seseorang hanya sebagian saja karena identitas budaya merupakan *cultural totalization*. Namun totalitas kebudayaan itu tidak selalu kelihatan, dia selalu bersembunyi di balik konteks multikultural. Akibatnya,

dalam cara yang sederhana orang hanya memprediksi ciri khas (tubuh, tampilan wajah, warna rambut, tampilan fisik tubuh, bahasa, pakaian, dan makanan), batas-batas, faktor-faktor utama penentu sebuah kebudayaan. Dengan kata lain dimanakah letak batas-batas identitas antar budayanya?. Untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa mengambil contoh; kebudayaan orang Badui. Kita dapat melihat identitas budayanya melalui gaya hidup penduduk asli, bagaimana penduduk setempat menyelenggarakan pesta adat, memperingati peristiwa siklus hidup, dan hal lain yang unik sebagai *cultural impressions* yang dianggap mewakili identitas budaya. Sekurang-kurangnya kita dapat melihat tampilan yang unik seperti bahasa, adat-istiadat, gerak-gerik tubuh waktu menari, dan pakaian.

Untuk memberikan pemahaman atas identitas yang lebih komprehensif, Martin dan Nakayama sebagaimana dikutip Alo Liliweri (2009: 78) memberikan pemahaman yaitu melalui pendekatan identitas (*identity approach*) yakni pendekatan psikologi sosial, komunikasi dan pendekatan kritis. **Pertama** Perspektif psikologi sosial berasumsi bahwa kehidupan dan perilaku individu tidak berlaku sendirian, individu ada dalam lingkungan sosial, oleh karena itu kepribadian individu dibentuk oleh kepribadian lingkungan sosial. **Kedua** perspektif komunikasi. Perspektif ini menekankan sifat dari interaksi *self group*, interaksi yang dilakukan seorang pribadi dan interaksi kelompok merupakan sesuatu yang komunikatif. Identitas dibangun melalui interaksi sosial dan komunikasi. Identitas dihasilkan oleh negosiasi melalui media yakni media bahasa. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa identitas

seseorang dapat ditentukan oleh tampilan diri pribadi (*avowel*), dalam membuat pengakuan terhadap orang lain bahwa anda (seorang pribadi) sedang berkomunikasi. Inilah identitas saya! Faktor penentu berikut sebagaimana yang dipetakan Lilliweri (2009: 79) tergantung pada bagaimana orang lain memberikan atribusi pada penampilan anda (*atribusi askripsi*).

Pengakuan (<i>avowel</i>)	Askripsi (<i>ascription</i>)
<ul style="list-style-type: none"> - Proses untuk menggambarkan diri atau pribadi anda. - Langkah yang menunjukkan bahwa anda sedang melakukan komunikasi. - Representasi anda sebagai pribadi terhadap orang lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses atribusi oleh orang lain terhadap pribadi anda. - Apa yang orang lain tanggapi ketika berhubungan dengan tampilan pribadi anda.

Ada interelasi yang jelas antara gejala-gejala di atas, antara yang anda (seorang pribadi) tampilkan dengan apa yang dilihat orang lain, misalnya dengan memakai busana muslimah kemanapun seseorang pergi maka tindakan akan berdampak pada tanggapan orang lain terhadap identitas seseorang, meskipun dua identitas itu mungkin tidak sepadan.

Ketiga, perspektif kritis. Perspektif ini didasarkan pada tiga pembentukan identitas yaitu: a) identitas kontekstual yaitu identitas dibentuk dalam suatu konteks. b) *restisting ascribed identities*. Merupakan upaya untuk mempertahankan bentuk *ascribed identity* (identitas keturunan) yang diwariskan kepada kita. c) Sifat dinamis dari identitas. Identitas selalu berada pada *motion* (gerak), artinya identitas itu bersifat dinamis, tidak pernah stabil.

Setiap orang berubah sepanjang waktu, tidak mengenal apakah perubahan itu pasif atau aktif. Identitas tidak selalu tetap, tetapi prosesnya sering berubah.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan di atas, dapat ditetapkan beberapa karakteristik identitas budaya yaitu: 1) Identitas budaya merupakan pusat penampilan kepribadian pribadi. 2) Identitas budaya terkadang dapat bertahan dalam konteks sosial yang selalu berubah; 3) Identitas budaya merupakan sesuatu yang berdimensi atau bermuka banyak (Liliweri, 2009: 82). Makin banyak perbedaan budaya yang dihadapi maka makin banyak pula identitas budaya orang lain yang berhadapan dengan budaya sendiri. Akibatnya makin tegar pula suatu pribadi membandingkan identitas budaya sendiri dengan budaya orang lain. Kebudayaan sendiri diartikan Bourdieu sebagaimana dikutip Safril Mubah, (2011:334) sebagai peta sebuah tempat, sekaligus perjalanan menuju tempat itu. Peta adalah aturan dan konvensi, sedangkan perjalanan adalah tindakan aktual. Apa yang disebut kesadaran budaya adalah perasaan untuk menegosiasikan aturan-aturan budaya itu, yang bertujuan untuk memilih jalan kita ke dalam kebudayaan tindakan adalah aksi kita terhadap kesadaran budaya. Di dalam peta itu terkandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan dan keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, serta segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Selain itu juga menyimpan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Tidak heran apabila Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sarana

hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

3. Adat-kebiasaan

Menurut Sir Edward Tylor sebagaimana dalam Horton dan Hunt (1999: 58) kebudayaan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang kompleks, keyakinan, kesenian, moral, adat istiadat, hukum, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan dapat dibagi ke dalam kebudayaan materi dan non materi. Kebudayaan yang non materi terdiri dari kata-kata yang dipergunakan orang, hasil pemikiran, adat istiadat, keyakinan yang dianut, dan kebiasaan yang diikuti. Sedangkan kebudayaan materi terdiri dari benda-benda hasil pabrik, alat-alat mebel, mobil, irigasi, parit dan lain sebagainya. Agar hubungan antar manusia dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, maka dirumuskan norma-norma di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Istilah adat-kebiasaan seringkali dipergunakan secara bergantian (*interchangeable*) untuk menunjuk pada adat-istiadat sebagaimana antara *term* moral dan etika (Supena, 2007: 205-210). Adat istiadat atau adat kebiasaan pada hakekatnya merupakan sistem norma yang disepakati oleh suatu masyarakat untuk menginternalisasikan dalam kehidupan sosial. Setiap anggota masyarakat akan selalu berperilaku sesuai norma yang ada, jika perilakunya tidak sesuai, maka akan merasa bersalah dengan sendirinya.

Sebagai hasil kesepakatan sosial (konvensi), suatu norma lahir dari pemikiran dan penghayatan hidup yang mendalam terhadap nilai-nilai yang diyakini bersama oleh warga masyarakat. Nilai-nilai itu kemudian

dikomunikasikan dan dipertukarkan antara warga masyarakat untuk memperoleh kesepakatan. Nilai-nilai yang disepakati itulah kemudian berkembang menjadi norma moral dan etika.

Mengingat kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti, maka dapat dikatakan bahwa kebudayaan bersifat *normatif*, artinya bahwa kebudayaan akan menentukan standar atau ukuran perilaku seseorang maupun masyarakat. Untuk makan kita menggunakan tangan kanan adalah dianjurkan dan pantas dalam budaya ketimuran, untuk menggaruk kepala kita diperbolehkan menggunakan dua tangan; kebudayaan kita tidak memiliki norma untuk menggaruk kepala. Menurut Harton dan Hunt, istilah “norma” memiliki dua kemungkinan, arti pertama yaitu “norma budaya” yaitu suatu konsep yang diharapkan ada. Kadang-kadang *norma statistis* (suatu ukuran bagi perilaku yang sebenarnya disetujui atau tidak) dianggap sebagai kebudayaan yang “nyata” dan kedua norma kebudayaan sebagai kebudayaan yang “ideal”. Menurut Harton dan Hunt (1999: 64-65) kebudayaan merupakan sistem norma yang sangat rumit—cara-cara merasa dan bertindak yang diharapkan distandarisasi—yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Pada awalnya norma terbentuk tanpa didasarkan kesadaran, namun semakin lama dibuat secara sadar. Misalnya didalam aktifitas jual beli motor, dahulu seorang perantara tidak mendapatkan bagian keuntungan, tetapi akhirnya terjadi kebiasaan seorang perantara harus ikut mendapatkan bagiannya.

Dalam beberapa hal norma-norma ini bersifat paksaan, ada yang

memiliki kekuatan mengikat, sedangkan menurut William Graham Sumner sebagaimana dalam Horton dan Hunt (1999:65-66) mengklasifikasikan sebagai berikut:

a) Kebiasaan (*folkways*).

Diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Hal ini menjadikan bukti bahwa orang banyak menyukai hal itu. Melalui coba-coba, situasi kebetulan atau beberapa pengaruh yang tidak disadari, sekelompok orang sampai pada salah satu kemungkinan ini, mengulanginya dan menerimanya sebagai cara yang wajar untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Menurut Ferdinand Tonnies (Soekanto, 1993: 196) kebiasaan memiliki tiga arti yaitu: *Pertama*, menunjuk pada suatu kenyataan yang bersifat obyektif, misalnya kebiasaan untuk sholat malam, kebiasaan minum teh di pagi hari, dan lainnya. *Kedua*, kebiasaan tersebut dijadikan kaidah bagi seseorang, atau menciptakan norma untuk dirinya sendiri. *Ketiga*, sebagai perwujudan kemauan atau keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu.

Jadi kebiasaan tersebut mengacu pada suatu indikasi bahwa setiap orang didalam melakukan tindakan-tindakannya selalu ingin didasarkan pada keteraturan. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan diakui serta dilakukan orang-orang dalam satu masyarakat. Bahkan dapat dijadikan patokan dan peraturan yang pada akhirnya tingkah laku masing-masing dapat diatur dan semuanya menimbulkan norma atau kaidah. Kejadian ini diturunkan pada generasi berikutnya dan menjadi salah satu kebiasaan. Menurut Horton dan Hunt (1999: 66), Kebiasaan dapat digolongkan menjadi dua yaitu: Pertama,

hal-hal yang seharusnya diikuti sebagai sopan santun dan perilaku sopan. Kedua, hal-hal yang harus diikuti karena yakin kebiasaan itu penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pandangan tentang salah dan benar ini berkaitan dengan kebiasaan disebut *tata kelakuan*.

b) Tata kelakuan (*mores*)

Yaitu gagasan yang kuat mengenai salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas secara sadar atau tidak oleh masyarakat terhadap anggotanya.

c) Adat-istiadat (*custom*)

Adat-istiadat merupakan norma yang sangat kuat daya pengikatnya, sehingga setiap anggota masyarakat yang melanggar akan menerima sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diberlakukan. Misalnya adat istiadat yang melarang terjadinya perceraian di Lampung. Jika terjadi perceraian tidak hanya yang bersangkutan yang tercemar, tetapi seluruh keluarga akan merasakannya. Untuk menghilangkan resiko itu maka harus digelar upacara adat khusus dengan biaya yang sangat besar. Norma-norma ini setelah mengalami suatu proses akhirnya menjadi bagian dari *social institution*. Yaitu sistem hubungan sosial yang terorganisasi untuk mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tertentu. Proses tersebut disebut institusionalisasi yaitu suatu proses yang dilewati suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga masyarakat sehingga norma tersebut dikenal, diakui dan

dihargai kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari.

d) Hukum

Banyak orang untuk selalu menuruti tata kelakuan secara sukarela, tetapi beberapa orang tergoda untuk melanggar tata kelakuan. Seseorang mungkin dipaksa untuk menyesuaikan diri karena ancaman hukum yang sah. Oleh karena itu hukum berfungsi untuk memperkuat tata kelakuan.

e) Nilai

Yaitu gagasan mengenai apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Dalam setiap masyarakat beberapa nilai memiliki penghargaan yang lebih tinggi dari nilai-nilai lainnya. Misalnya ketepatan waktu, persaingan, merupakan nilai-nilai utama dalam masyarakat Amerika.

Norma-norma di atas merupakan bagian dari pranata sosial. Menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip Hartomo dan Aziz (1999: 49) pranata sosial merupakan suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan dalam masyarakat. Terkait dengan peran adat-kebiasaan dalam masyarakat, adat-istiadat dan kebudayaan memiliki nilai pengontrol dan nilai sanksi sosial terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Tingkah laku yang dianggap tidak cocok lagi, melanggar norma dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dalam tingkah laku umum itu, menurut Kartono dianggap sebagai “masalah sosial” (Sujarwa, 2010: 43). Perilaku-perilaku yang menyimpang (*deviant behavior*) adalah salah satu bentuk dari permasalahan sosial, maka dalam perkembangannya sering pula menimbulkan budaya baru. Jika perilaku yang menyimpang terjadi

berulang-ulang, masyarakat tidak lagi merasakan bahwa bentuk perilaku itu merupakan suatu bentuk penyimpangan maka terbentuklah budaya baru tersebut. Dengan demikian pranata sosial merupakan suatu alat untuk memberi pedoman perilaku dan sikap bagi setiap anggota masyarakat. Pranata sosial juga sebagai alat pengendalian sosial, baik yang bersifat preventif maupun kuratif. Kedua fungsi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan suatu ketertiban sosial (*social order*), sebagai prasyarat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat.

Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa disiplin pengetahuan yang mendukung kita dalam memahami latar belakang munculnya sebuah ketentuan hukum Islam. Salah satu disiplin pengetahuan tersebut adalah *'urf* atau dalam bahasa Indonesia disinonimkan dengan adat-kebiasaan. Dari segi kebahasaan *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf *'ain, ra' dan fa'* yang berarti dikenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi) kata *ma'ruf* (dikenal sebagai kebaikan), serta kata *'urf* (kebiasaan yang baik) (Dahlan, 2011:209). Adapun secara terminologi kata *'urf* mengandung makna:

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang telah dikenal atau populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”.

Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (adat-kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya dapat diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar (Dahlan,

2011: 209) . Kata *al-‘adah* itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Menurut Abdul Wahhab Khalaf (1996: 149) *‘urf* merupakan sesuatu yang sudah dikenal manusia karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan baik yang berupa perkataan dan perbuatan, sekaligus disebut dengan adat. Dengan kata lain *‘urf* dan adat tidak ada perbedaan. *‘Urf* dalam perbuatan manusia misalnya jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tanpa mengucapkan *sighat*. Sedangkan *‘urf* yang bersifat ucapan misalnya saling pengertian terhadap pengertian *al-walad* yang berarti anak laki-laki bukan anak perempuan, atau misalnya perkataan “engkau saya kembalikan pada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia berarti seorang wanita telah ditalak suaminya. Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa *al-‘urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *al-‘urf qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-‘urf al-fi’li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).

Menurut Rahman Dahlan dari segi jangkauannya, *‘urf* dibagi dua yaitu ;

- a. *al-‘urf al ‘amm* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh.
- b. *al- ‘urf al-khash* yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat atau wilayah tertentu saja. Misalnya kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian

luas tanah 10x10 meter.

Pada umumnya adat mengacu pada konvensi yang telah lama ada, baik yang sengaja diambil atau akibat dari penyesuaian yang tidak disengaja terhadap keadaan, yang dipatuhi dan sangat meninggikan perilaku atau perbuatan (Levy, 1957: 248). Dengan pengertian ini dalam ensiklopedi Islam yang memiliki adat bukan hanya manusia tetapi hewan pun memiliki adat tersendiri sesuai dengan karakter dan habitatnya.

Ditinjau dari segi keabsahannya *'urf* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu;

a. *Al-'urf as-Shahih* ('Urf yang absah)

Yaitu adat kebiasaan yang sesuai dengan dengan masyarakat yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya jual beli mobil dengan sistem *inden* (pemesanan) dengan memberikan uang muka oleh pembeli kepada penjual terlebih dahulu sebelum mendapatkan atau menerima mobil yang diinginkan.

b. *Al-'Urf al-Fasidah* ('Urf yang rusak)

Yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan yang bertentangan dengan dalil-dalil syar'i . Sebaliknya dari *al-'urf as-shahih*, maka adat kebiasaan yang salah adalah menghalalkan hal-hal yang haram atau sebaliknya. Misalnya, pada masyarakat Tapanuli, Sumatra Utara atau pada masyarakat adat Riau tertentu mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* hanya karena keduanya berasal

dari satu komunitas adat yang sama atau satu marga. Namun seiring perkembangan zaman dan masuknya pemahaman ajaran Islam kepada mereka secara berangsur-angsur adat-kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan.

Dari uraian dan berbagai definisi di atas *'Urf* disebut juga adat-kebiasaan. Artinya keduanya memiliki pengertian dan perspektif yang tidak jauh berbeda. *'Urf* sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khallaf (1994: 123) terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite. Hal ini berbeda dengan *ijma'*, karena *ijma'* terbentuk dari para *mujtahid* secara khusus dan orang awam tidak ikut andil dalam pembentukannya.

Menurut para ulama sebagaimana dikutip oleh Rahman Dahlan (2011: 212) mereka menyepakati kedudukan *al-'urf ash-shahih* sebagai salah satu dalil syara' berdasarkan atas argumen-argumen sebagai berikut:

- a. Firman Allah pada surat al-A'raf (7) : 199;

خذ العفو واءمر بالعرف واعرض عن الجاهلین

“Jadilah engkau menjadi pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedang yang disebut *ma'ruf* adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan yang dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan dibimbing oleh prinsip-prinsip ajaran Islam.

Kata *al-ma'ruf*, baik dalam rangkaian kata *amr ma'ruf nahy munkar* maupun berdiri sendiri, disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 39 kali dalam 12 surat. Kata ini memiliki arti harfiah sebagai “*yang dikenal atau yang dapat dimengerti dan dapat dipahami serta dapat diterima oleh masyarakat*” perbuatan yang makruf itu jika dikerjakan dapat diterima dan dapat dipahami oleh manusia, dan dipuji karena patut dikerjakan oleh manusia yang memfungsikan akalnyasebagai cirri khas kediriannya (Muhidin, 2002: 45). Kebalikan dari *ma'ruf* adalah *munkar*, yakni yang dibenci, tidak disenangi dan ditolak oleh masyarakat karena tidak patut, karena tidak selayaknya dikerjakan oleh manusia yang berakal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, *ma'ruf* hampir sama dengan pengertian *common sense* yakni logis dan masuk akal.

Mengutip pendapat Dawam Rahardjo (dalam Muhidin,2002: 46) bahwa alasan tidak dapat dipisahkannya anjuran pada yang *ma'ruf* dan mencegah pada yang *munkar*, sebagaimana penuturannya berikut:

“Agama datang menuntun manusia dan memperkenalkan mana yang *ma'ruf* dan mana yang *munkar*. Sebab itu, *ma'ruf* dan *munkar* itu tidaklah terpisah, kalau ada orang yang berbuat *ma'ruf*, seluruh masyarakat umumnya menyetujui membenarkan dan memuji. Kalau ada yang berbuat *munkar*, seluruh masyarakat menolak, membenci dan tidak menyetujuinya. Sebab itu bertambah tinggi kecerdasan beragama, bertambah kenal akan yang *ma'ruf* dan bertambah benci pada yang *munkar*.”

Berdasarkan pandangan di atas, perbuatan yang baik dan yang buruk ditentukan oleh pendapat umum. Pandangan masyarakat menjadi barometer apakah sesuatu itu *ma'ruf* atau *munkar*. Dengan demikian perkataan *ma'ruf* berkaitan dengan *al-'urf* yang berarti *adat*, dan dalam hal ini *adat yang baik*. Dalam pengertiannya sebagai adat yang baik itulah (*al-'urf*) diakui

eksistensi dan fungsinya dalam Islam, sehingga dalam teori ushul fiqh disebutkan bahwa adat dapat dijadikan hukum (*al-'adah muhakkamah*).

Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi (*adat*) yang sudah berjalan. Suatu hukum dapat berubah karena perubahan '*Urf*'. '*Urf* dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sehingga konsekwensinya adalah terjadinya perubahan hukum sesuai dengan perubahan '*urf*'. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan:

الحكم يتغير بتغير الاء زمنا والامكنة والاحوال والاشخاص والبيئات

"Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan".

Munculnya kaidah tersebut memberikan pengukuhan bahwa agama Islam akan tetap relevan sesuai dengan kondisi zaman dan tempat (*al-Islam shalihun likulli zaman wa makan*) karena kondisi zaman akan selalu berubah. Dengan demikian eksistensi Islam tidak akan kaku, jumud, dan Islam akan tetap dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat. Salah satu contoh tentang perubahan tersebut adalah ulama salaf berpendapat, seseorang tidak diperbolehkan menerima upah atau honor dalam mengajarkan al-Qur'an , shalat, puasa maupun haji. Demikian juga tidak boleh menerima upah sebagai imam masjid dan muadzin. Sebab kesejahteraan mereka telah ditanggung oleh *baitulmal* . Akan tetapi karena perubahan zaman, dimana *baitulmal* tidak lagi mampu menjalankan fungsinya, maka ulama kontemporer memperbolehkan menerima honor atas pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan.

b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud ;

فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون شينا فهو عند الله شياء

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh manusia maka ia buruk di sisi Allah”

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas menurut Rahman Dahlan

(2011: 212) bila dilihat dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan ajaran-ajaran Islam, adalah baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari harus dihindari. Hal ini disesuaikan dengan firman Allah pada surat al-Maidah (5):6

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dengan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf’ di atas sebagaimana dalil

hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan

kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-‘urf* antara lain berbunyi :

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

“Yang berlaku berdasarkan ‘urf’ seperti berlaku berdasarkan nash”

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف

“Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatas di dalamnya , bahkan tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan , maka pemberlakuannya dirujukkan kepada ‘urf’.

Abdul Karim Zaidan (dalam Efendi, 2008:156-157) menyebutkan beberapa persyaratan yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- a) 'Urf tersebut termasuk '*urf sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan disuatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b) 'Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk suatu negeri.
- c) 'Urf itu sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu adalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka pernyataan dalam arti wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudiansetelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak berikat dengan kebiasaan umum yang sudah berlaku, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan 'urf. Misalnya adat-kebiasaan di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun

ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu bukan adat yang berlaku.

Dari uraian dan berbagai definisi di atas '*Urf*' disebut juga adat-kebiasaan. Artinya keduanya memiliki pengertian dan perspektif yang tidak jauh berbeda. '*Urf*' sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khallaf (1994: 123) terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite. Berbeda dengan '*ijma*', karena '*ijma*' terbentuk dari para '*mujtahid*' secara khusus dan orang awam tidak ikut andil dalam pembentukannya.

Dalam Islam adat dapat dijadikan sumber hukum apabila mengandung tiga syarat diantaranya; tidak berlawanan dengan dalil-dalil yang tegas dalam al-Qur'an dan al-Hadits, telah menjadi kebiasaan secara terus menerus dan berlaku di masyarakat, serta menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya. Sedangkan menurut Daulay sebagaimana dikutip oleh Wanda Fitri (2006: 212) secara umum nilai agama dapat dikategorikan menjadi dua yaitu yang bersifat fundamental dan instrumental. Termasuk fundamental adalah akidah, syari'ah dan akhlak karena semuanya berkaitan dengan ibadah pokok yang bersifat tidak dapat diubah. Sedangkan yang bersifat instrumental adalah muamalah yaitu bidang yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan.

Kategori kedua inilah yang pada prakteknya memunculkan berbagai adat-kebiasaan masyarakat yang tak jarang menimbulkan fenomena terkait

dengan kategori pertama. Munculnya penetapan hukum Islam kekinian dalam mensikapi berbagai perubahan perilaku, pada akhirnya melahirkan hukum Islam yang disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada.

Menurut Natsir yang dikutip Dauly dalam Wanda Fitri (2006:212) jika berhadapan dengan kaedah sosial maka nilai agama dalam muamalah dapat bersifat; memelihara dan mengukuhkan nilai-nilai norma yang mengandung arti positif, menghilangkan dan mengikis nilai-nilai dan norma-norma yang mengandung arti negatif, dan menimbulkan nilai-nilai dan norma-norma yang mengandung arti positif yang belum ada.

Dengan demikian nilai-nilai normatif agama mengandung peranan penting dalam melandasi nilai-nilai adat dan secara bersama-sama saling mengisi, untuk memperkaya dan menjaga kelestarian kebudayaan yang bersifat lokal maupun universal.

4. Dakwah Islam

Kata dakwah secara etimologis berakar dari kata dalam bahasa Arab, yaitu *da'a (fi'il madhi)*, *yad'u (fi'il mudhari')*, *da'watan (masdar)* yang berarti ; mengajak, menyeru, dan memanggil. Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi' (tt : 120, 692, dan 693), dalam al-Qur'an kata-kata ini dan yang terbentuk darinya disebutkan sebanyak 213 kali. Ini artinya kata ini disebutkan dengan jumlah yang tidak sedikit sehingga diharapkan kepada manusia supaya mengajak manusia lain kepada ajaran Islam.

Dasar-dasar yang dijadikan landasan mengapa dakwah harus dilakukan diantaranya QS. An-Nahl (16) : 125, QS. Ali-Imran (3): 104).

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل
عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين

Artinya: “ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير وياء مروون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.

Adapun Imam Nawawi (tt: 112) dalam kitab *Riyadhus Shalihin* menyebutkan dasar-dasar dakwah dalam hadits diantaranya:

من رأمنكم منكرا فليغيره بيده فاءن لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقالبه وذلك اضعف
الايمان

“Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu maka dengan lisannya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman. (HR. Muslim)”
Dalam hadits lain disebutkan:

بلغوا عني ولو آية

“Sampaikanlah dariku walau satu ayat. (HR. Bukhari).

Dasar al-Qur’an dan hadits di atas menunjukkan betapa pentingnya aktifitas dakwah harus dibebankan dan dilakukan setiap muslim baik secara individu maupun kolektif agar manusia terhindar dari kesesatan serta mendapatkan jalan yang lurus sebagaimana yang diidealkan dalam agama Islam.

Secara terminologis dakwah memiliki pengertian yang bervariasi. Ibnu

Taimiyah (1985: 185) misalnya, mengartikan dakwah sebagai suatu proses dalam upaya mengajak mad'u atau masyarakat supaya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sekaligus mentaati apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Berbeda dengan Syekh Ali Mahfuzh dalam kitabnya *Hidayatul Mursyidin* (1975: 7), mendefinisikan dakwah sebagai upaya memotivasi ummat untuk melaksanakan kebaikan, mengikuti petunjuk serta memerintahkan mereka berbuat makruf, dan mencegah dari yang munkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan Muhammad Sulthon (2003: 4-10), dakwah diartikan sebagai seluruh aktivitas muslim dalam rangka mengaktualisasikan keimanannya, baik secara individu atau kolektif, untuk menkonstruksi tatanan sosial yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Illahi. Dengan kata lain dakwah Islam berarti menyampaikan pesan atau ajaran Islam kepada masyarakat, sebagaimana telah disunnahkan oleh Nabi Muhammad saw pada jamannya.

Meskipun beberapa definisi dakwah memperlihatkan perbedaan dalam perumusan kalimat dan bahasa yang berbeda, tetapi kandungan isinya tetap sama bahwa dakwah dipahami sebagai seruan, ajakan dan panggilan dalam rangka membangun masyarakat Islami berdasarkan kebenaran ajaran Islam yang hakiki. Dengan kata lain dakwah merupakan upaya atau perjuangan untuk menyampaikan ajaran agama Islam yang benar kepada umat manusia dengan cara simpatik, jujur, adil, tabah dan terbuka, serta menghidupkan jiwa mereka dengan janji-janji Allah Swt tentang kehidupan yang membahagiakan serta menggetarkan hati mereka dengan ancaman-ancaman-Nya (Pimay,

2006: 7).

Dalam perspektif sistem, dakwah merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem – sub sistem yang saling berkaitan antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya. Sub sistem dakwah antara lain terdiri dari sub sistem da'i (pelaku dakwah), sub sistem mad'u (obyek dakwah), sub sistem *maddatut da'wah* (materi dakwah), sub sistem *wasilatut da'wah* (media dakwah), dan sub sistem *thariqatut da'wah* (metode dakwah).

Jalinan hubungan antar sub sub sistem dalam dakwah, harus dipelihara agar selalu fungsional antara sub sub sistem satu dengan sub sub sistem lainnya untuk mencapai keseimbangan dan keteraturan (*social order*). Dakwah juga sebagai sub sistem dari sistem sosial masyarakat di sekitarnya. Untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan dalam masyarakat, dakwah dengan status yang dimilikinya harus mampu memainkan peranan untuk keteraturan sosial.

Dakwah menjadi kata kunci, untuk melakukan transformasi masyarakat, karena dakwah merupakan agen perubahan sosial (*agent of change*), dakwah mengandung makna melakukan upaya sistematis untuk mengubah perubahan dalam segala aspek kehidupan guna disesuaikan dengan ideal moral Islam (Amrullah, 2008:25). Kegiatan dakwah diarahkan minimal ke dalam tiga hal: (1) Mensosialisasikan nilai-nilai ideal (dakwah *ilal-khair*), (2) Memajukan tatanan masyarakat yang sudah baik menjadi lebih baik (*amar ma'ruf*), (3) Merubah tatanan masyarakat yang dianggap destruktif (*nahi munkar*).

Ketiga fokus tersebut tidak bisa dipisah-pisahkan, apalagi diambil salah satu saja. Sebab jika yang pertama diambil tanpa kedua dan ketiga, maka dakwah yang dilakukan hanya bersifat normatif, tidak realistis, sehingga tidak ada efek berarti secara sosial. Jika yang kedua saja tanpa yang pertama dan ketiga, seorang da'i atau muballigh akan terlalu pragmatis, hal mana tidak menjamin keselamatan kebijaksanaannya. Yang paling kurang tepat jika hanya mengambil bagian ketiga saja, tanpa pertama dan kedua. Akibatnya dakwah hanya berisi melarang tanpa memberi jalan keluar, bahkan mungkin hanya berisi maki-makian dan kutukan-kutukan (Madjid, 1993:200-201).

Seharusnya para da'i jangan terfokus pada aktivitas dakwah *bil-lisan*, tanpa mau memanfaatkan media dakwah seperti: radio, televisi, internet, koran, majalah, bulletin, poster, pamflet, dan buku. Sejumlah media dakwah tersebut dapat mempercepat dan memperluas target-target utama dari dakwah Islam (Arif, 2001:61). Umat Islam semakin menyadari, dakwah yang dilaksanakan dengan hanya memanfaatkan media tradisional, pada segmen masyarakat tertentu tidak efektif lagi untuk merespons akselerasi perubahan sosial masyarakat. Pola hidup, gaya hidup, pengaturan waktu dan problem-problem masyarakat akibat modernisasi, telah merubah pola-pola lama yang selama ini dianut. Maka pemanfaatan media moderen menjadi pilihan atas tuntutan perubahan di atas (Sholihati, 1998:19). Pemanfaatan media moderen dapat dilakukan dalam dua model, *pertama dependent model*. Artinya dakwah dilakukan dengan cara membuat jaringan ke sejumlah pengelola media massa, untuk menyiarkan atau menerbitkan pesan-pesan Islam. Model pertama ini

menempatkan dakwah pada posisi *dependent* dan lemah, sehingga produk-produk dakwah yang dihasilkan harus mengikuti aturan main pemilik media. *Kedua, independent model.* Adalah usaha dakwah yang dilakukan dengan cara mendirikan media yang dikelola secara mandiri oleh aktivis dakwah. Model ini memberikan kebebasan untuk menyajikan materi-materi dan variasi dakwah, sesuai dengan keinginan para pengelolanya (Faqih, 2000: 4). Era globalisasi yang antara lain ditandai inovasi dan perkembangan teknologi informasi, memungkinkan setiap orang (mad'u) memanfaatkan informasi dalam setiap usaha dan aktivitasnya. Apalagi pola pikir dan gaya hidup masyarakat global pada umumnya dibentuk oleh media massa.

Di dalam sistem dakwah, sub sistem da'i merupakan sub sistem yang paling menentukan untuk mencapai keberhasilan dakwah. Sub sistem da'i menjadi motor penggerak bagi sub sistem – sub sistem lainnya. Pada sisi lain sistem di luar sistem dakwah yakni masyarakat senantiasa mengalami perubahan, baik perubahan yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Maka tuntutan kemampuan da'i secara terus-menerus harus ditingkatkan, jika kegiatan dakwah yang dilakukan ingin memperoleh kesuksesan. Dalam kaitan ini, Koento Wibisono (1992: 28-29) menuntut kepada para da'i, atau mubaligh agar memiliki dua kesiapan yaitu *kesiapan intelektual dan kesiapan moral*. Kesiapan intelektual diartikan sebagai penguasaan materi dan wawasan luas yang harus dimiliki. Sebab pandangan yang semakin rasionalistik disertai sikap kritis dari para mad'u merupakan tantangan yang harus diantisipasi dengan kemampuan untuk menyajikan

materi dakwah yang tepat dan menyentuh dengan permasalahan yang dihadapi penerima dakwah (mad'u). Meminjam istilah Van Peursen, agama bagi manusia masa kini tidak cukup dijelaskan sebagai “kata benda” melainkan harus ditekankan sebagai “kata kerja”; tidak cukup hanya diterangkan aspek ontologiknya, melainkan lebih ditekankan pada aspek fungsionalnya. Sehingga agama menjadi lebih dihayati oleh manusia masa kini yang kesehariannya sudah dipenuhi oleh peran canggihnya teknologi. Para da'i harus menggunakan metode yang tidak hanya menyentuh pada segi *logos* dan *ethosnya* saja, melainkan juga pada segi pathosnya (*mood atau stemming*). Sehingga tidak hanya landasan rasional dan kesusilaan saja, tetapi juga hati nurani akan menjadi daya dorong dalam mengamalkan agama sebagai sesuatu yang wajib dalam ikut membangun masyarakatnya.

Dengan menyimak berbagai macam pandangan tentang dakwah tersebut, ternyata ada elemen-elemen baru dalam dakwah. Disamping unsur komunikasi, dakwah juga sangat mementingkan unsur institusionalisasi, dan aksi. Dakwah *bil-lisan* sering hanya berhenti pada komunikasi, sedangkan dakwah pengembangan masyarakat memerlukan ketiganya (Koentowijoyo, 1992: 76). Untuk melaksanakan santunan, misalnya santunan anak-anak, tidak hanya diperlukan penjelasan-penjelasan mengenai kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, tetapi termasuk melembagakannya dalam sebuah organisasi yang secara berkelanjutan dapat menangani masalah tersebut. Dakwah dalam konteks ini, bukan hanya penyadaran, tetapi juga pelembagaan dari kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu dakwah memerlukan personil yang tidak hanya

ahli dalam berceramah, juga ahli dalam organisasi, dan ahli pada bidang persoalan yang sedang ditangani. Memanggil orang ke jalan Allah menjadi pekerjaan yang penuh tantangan, karena itu dalam dakwah perlu mendapat perhatian pula dari sisi *management*-nya.

Untuk melakukan dakwah pengembangan masyarakat diperlukan kemampuan analisis sosial budaya, termasuk di dalamnya psikologi umat Islam. *Pertama, analisis etno-psikologi* yang akan memberikan gambaran bagaimana psikologi umat Islam dari sebuah lingkungan etnis tertentu. Psikologi seseorang atau kelompok sangat dipengaruhi oleh lingkungan budayanya. Orang Jawa mempunyai psikologi etnis yang berbeda dengan orang Padang, sehingga dakwah di lingkungan orang Jawa harus pula berbeda dengan dakwah di lingkungan orang Padang. *Kedua, analisis sosiologi* akan memberikan sumbangan dalam menganalisis pelapisan sosial. Para juru dakwah harus dapat membedakan lapisan elit dan lapisan bawahnya. Lapisan atas akan mempunyai akses yang lebih luas pada informasi dan lebih cepat dalam menerima perubahan. Demikian juga lingkungan sosial sangat menentukan psiko-budaya masyarakat. Masyarakat desa akan sangat berbeda dengan masyarakat kota. Dengan kata lain menurut Kuntowijoyo (1992: 77) , dakwah pada orang Jawa dari lapisan bawah yang tinggal di pedesaan berbeda dengan dakwah pada kelompok lainnya. Membangun paradigma baru model dakwah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. “Pembangunan” itu semakin menjadi urgen manakala dalam realitas empirik masalah kedakwaan menunjukkan sebuah keprihatinan yang mendalam. Dakwah yang

diplatformkan sebagai daya dorong kuat dalam memberdayakan obyek dakwah, menjadi semakin kurang memiliki kekuatan dan tidak punya fokus dalam penggarapannya. Realitas ini terasa semakin bias ketika berbagai asumsi yang dibangun dalam memaknai dakwah kurang tepat, misalnya dakwah hanya dimaknai sebagai penyampaian dari luar (hanya dari pelaku dakwah/da'i) , kekakuan untuk memaknai istilah dakwah dari masyarakat (obyek dakwah) yang memiliki "kemampuan" hanya diposisikan sebagai sesuatu yang statis.

Munculnya kesalahan dalam pemaknaan dakwah tersebut karena adanya penyederhanaan konsepsi dakwah yang dalam perkembangannya didasarkan atas asumsi-asumsi yang dibangun (Abd. Halim, 2001:21-22). Asumsi-asumsi dalam pemaknaan dakwah yang ada selama ini diantaranya:

Asumsi pertama, bahwa dakwah diartikan sebagai suatu penyampaian pesan dari luar. Dakwah dalam pemahaman ini berwujud semacam upaya-upaya membawa seperangkat ajaran yang baru dan asing bagi masyarakat. Pemahaman itu akan membawa konsekuensi kesalahlangkahan dakwah baik dalam formulasi, pendekatan, atau metodologis pesan dakwahnya. Karena dakwah dianggap datang dari luar, maka langkah pendekatan lebih diwarnai pendekatan interventif. Para da'i lebih memosisikan sebagai orang asing, tidak terkait dengan apa yang dirasakan, dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Asumsi kedua, memaknai dakwah secara kaku yaitu sebagai kegiatan ceramah dalam arti sempit. Kesalahan itu sebenarnya sudah sering diungkapkan, tetapi dalam pelaksanaannya tetap terjadi penciptaan makna, sehingga orientasi dakwah sering pada hal-hal yang hanya bersifat rohaniah saja.

Asumsi ketiga, menganggap masyarakat yang menjadi sasaran dakwah sering dianggap sebagai masyarakat yang *statis, vacuum, atau steril*. Padahal di era global saat ini masyarakat dimudahkan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan baik melalui televisi, radio, media cetak, internet dan lain-lain. Dengan demikian masyarakat saat ini memiliki pengetahuan luas dan pola pikir yang lebih pintar dibandingkan era-era sebelumnya. Selain itu para da'i dihadapkan pada masyarakat yang memiliki *setting* (latar belakang) dengan berbagai corak dan keadaannya. Perubahan masyarakat yang begitu cepat mengarah pada masyarakat yang fungsional, masyarakat teknologis, masyarakat saintifik, dan menjadi masyarakat yang terbuka. Akibatnya terjadi kesenjangan (*gap*) antara pelaku dakwah dengan realitas dan kondisi sosio kultural masyarakat. Sehingga yang terjadi dakwah menjadi disfungsional.

Asumsi keempat, ada kecenderungan pada kalangan da'i untuk melakukan dakwah secara individual, tanpa terkait dengan da'i-da'i yang lain atau dengan lembaga-lembaga dakwah lainnya untuk melakukan secara bersama-sama. Akibatnya, dakwah yang dilakukan hanya terbatas pada dakwah *bil-lisan* (dengan lisan). Mungkin juga tanpa perencanaan yang matang dan evaluasi dalam setiap langkahnya. Dan lebih fatalnya apabila da'i dalam melakukan kegiatan dakwahnya berusaha menyesuaikan dengan hobi dan kesenangan masyarakat yang mendengarkannya. Sehingga, meski sering mendengar ceramah, perubahan dalam masyarakat hampir tidak ada. Karena itu sudah waktunya dakwah dilakukan dalam suatu organisasi yang rapi dan teratur untuk menghimpun berbagai keahlian, profesi dan kekuatan. Di situ

terdapat ahli perencanaan, ahli pendidikan, ahli komunikasi, ahli psikologi, ahli pertanian, ahli kesehatan dan ahli dibidang yang lainnya. Dalam organisasi dan lembaga tersebut direncanakan dengan matang materi dan metode dakwah dan juga langkah-langkah evaluasinya. Sebagaimana dalam firman Allah:

ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh” (al-Shaf:4).

Asumsi kelima, dakwah seringkali dilakukan dengan berbagai sikap kehati-hatian yang berlebihan dari para da'i itu sendiri. Pelaksanaan dakwah yang wujudnya *tabligh* dan sejenisnya sedapat mungkin tidak dilaksanakan dalam rangka untuk mengubah suatu apapun dalam masyarakat. Itu merupakan pandangan yang keliru. Logikanya, untuk apa dia melaksanakan dakwah jika hanya sekedar sebagai hiburan sebagaimana seorang penyanyi mendengarkan lagu yang menjadi pilihan masyarakat. Menyampaikan suatu kebenaran dan menguntungkan hendaknya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “sampaikanlah kebenaran meskipun pahit akibatnya”. Persoalannya kemudian para da'i harus melihat dan merekonstruksi masyarakat dalam kerangka memberikan “obat” yang harus ditelan oleh penderita. Ia harus sadar bahwa rasa pahit obat akan membawa dampak kesembuhan pada penderitanya.

Munculnya berbagai asumsi tentang konsepsi dakwah yang menjadikan proses pelaksanaan dakwah tidak berjalan maksimal tersebut, perlu kiranya kita *review* kembali pemikiran dan paradigma dakwah yang sudah ada selama ini dengan berbagai konsep yang telah ditawarkannya. Konsep mendasar ajaran

dakwah pada dasarnya tunggal, yakni mengajak manusia untuk bersama menuju ke jalan Tuhan (*ud'u ila sabili rabbika*). Doktrin fundamental dakwah ini, secara teoritikal, diakui oleh semua umat Islam sebagai consensus dan pengetahuan umum (*commen sense*) yang tak perlu dipertanyakan lagi. Namun demikian, secara praktikal, pengetahuan umum ini dalam sejarah mengalami proses pemahaman dan kontekstualisasi. Dalam bentuk yang aktual, konsep tunggal itu kemudian ditafsirkan oleh umat Islam melalui proses dialektika kultural-kontekstual dengan warna yang beraneka ragam. Dari proses dialektika tersebut, selanjutnya praktek dakwah tidak lagi tunggal, tetapi terejawantah dalam format pemikiran dan gerakan dakwah yang memiliki banyak warna dan alternatif.

Dalam kajian Ilyas Ismail dan Prio Hotman (2011: 211-263) secara praktikal pengejawantahan dakwah dalam pemikiran dan gerakannya meliputi berbagai paradigma dalam pelaksanaan proses berdakwah. Diantara pemikiran dan gerakan dakwah tersebut adalah:

1. Dakwah paradigma *tabligh*.

Tabligh atau ceramah merupakan bagian penting dalam dakwah. Yaitu proses penyampaian ajaran Islam merupakan bagian integral yang tidak mungkin untuk ditinggalkan. Karena bagaimanapun juga, dakwah dengan cakupan garapannya yang sangat luas tidak mungkin dilakukan tanpa *tabligh*.

Namun begitu, belakangan ini istilah *tabligh* tidak lagi dipandang sebagai suatu proses dari tahapan panjang dakwah, justru menggeser posisi dakwah itu sendiri. Pola pikir ini memandang dakwah tak lebih dari sekedar

tabligh yaitu kegiatan penyampaian ajaran agama kepada khalayak (publik). Pendekatan dakwah yang dilakukan menurut paradig ini adalah mengajak masyarakat melalui nasehat-nasehat (*al-maw'idz*) dan membujuk mereka untuk berhijrah dari lingkungan yang melalaikan menuju idealisme Islam yang tertuang dalam berbagai perkara fardhu, sunnah, wajib, hingga kebiasaan sehari-hari.

2. Dakwah paradigma pengembangan masyarakat.

Pengembangan masyarakat dimaknai sebagai usaha untuk membangun masyarakat dari segenap aspeknya secara bertahap dan teratur menuju kearah atau tujuan yang dikehendaki. Paradigma pengembangan masyarakat lebih mengutamakan aksi ketimbang wacana retorika. Karena itu, bentuk pemikiran dakwah ini tidak terkonsolidasi dalam sebuah mazhab tertentu yang sistemik dan dapat ditelaah sebagai rujukan. Namun demikian sebagai bentuk gerakan dakwah, paradigma ini mengejawantah dalam lembaga-lembaga swadaya muslim yang independen dari gerakan politik massif. Kegiatannya lebih menitikberatkan dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, seperti penyuluhan-penyuluhan, pengembangan ekonomi mikro dan menengah, pengembangan SDM dan pendidikan madrasah atau pesantren.

Dari segi metode dakwahnya, paradigma ini berusaha mewujudkan Islam dengan jalan menjadikan Islam sebagai pijakan pengembangan masyarakat, Islam adalah agama kemanusiaan dan profetik. Artinya, Islam dihadirkan demi kepentingan kelangsungan hidup manusia dan untuk memberdayakan manusia dengan segenap potensinya sebagai wakil Allah di

muka bumi.

3. Dakwah Paradigma Harakah

Aliran dakwah ini lebih menekankan aspek tindakan daripada wacana (teoretisasi). Menurut Hasan al-Qattany yang dimaksud dakwah harakah adalah dakwah yang berorientasi pada pengembangan masyarakat Islam, dengan melakukan reformasi total (*islah*) terhadap seluruh aspek kehidupan sosial, baik terkait dengan individu (*islah al-fard*), keluarga (*islah al-usrah*), masyarakat (*islah al-mujtama'*) hingga negara (*islah al-daulah*). Sesuai definisi di atas, paradigm ini lebih mengklaim memiliki ruang gerak yang lebih komprehensif dibanding dengan dakwah pengembangan masyarakat. Jika dakwah pengembangan masyarakat lebih menitikberatkan perjuangan independen dari perpolitikan, maka dakwah harakah justru menilai politik sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari sistem Islam, sehingga dakwah tidak dapat dipisahkan dari politik. Dalam pandangan paradigma harakah, Islam disimbolkan dengan 3D, yaitu din, (agama), daulah (negara), dan dunya (dunia).

4. Dakwah paradigma kultural

Mazhab dakwah kultural merupakan turunan dari penafsiran Islam yang bercorak kultural dan dinamis dialogis. Menurut paradigma ini Islam sebagai agama universal terbuka untuk ditafsirkan sesuai dengan konteks budaya lokal tanpa perlu takut kehilangan orisinalitasnya. Alur pemikiran ini menegaskan bahwa Islam pada dasarnya natural, artinya Islam selaras dengan kecenderungan alamiah manusia di manapun ia berada. Islam mampu mengakomodasi setiap budaya dan turut memberi warna kepada setiap budaya

yang disinggahi. Jadi dalam paradigma ini Islam dibedakan dari budaya. Islam adalah suatu keyakinan yang menuntut penegasan nilai-nilai kemanusiaan universal melalui pelaksanaan sistem moral, sistem moral ini dijadikan inspirasi bagi norma-norma budaya lokal. Proses ini disebut sebagai akulturasi Islam – budaya atau disebut kebudayaan Islam. Jika Islam sebagai agama diyakini dengan kesakralannya, maka kesatuan akulturasi Islam budaya ini tidak lagi bernilai sakral, tetapi lebih bernilai historikal dan lokal.

Desakralisasi Islam-budaya itu menurut paradigma Islam kultural juga menyentuh proses awal kelahiran dakwah Islam. Pada waktu itu, Islam sebagai agama juga mengalami interaksi dan dialog dengan budaya setempat (dalam hal ini budaya Arab) sehingga lahirlah kebudayaan “Islam perdana” yakni bentuk Islam kultural pertama kali muncul. Kebudayaan Islam perdana itu juga tidak sakral dan mesti dibedakan dari Islam yang sesungguhnya. Sebab, pensakralan budaya Islam perdana sama saja mencederai karakteristik universalisme Islam. Ketika pensakralan itu dilanjutkan sebagai sebuah idealisme (paradigma) dakwah, maka yang terjadi adalah normativitas dan normalitas beragama, dan menurut mazhab kultural, itulah kesalahan yang terjadi pada mazhab dakwah harakah yaitu terjadi kekakuan dan tidak peka terhadap unsur-unsur kebijakan lokal dan kontekstual.

Menurut mazhab kultural, sejarah dakwah Islam dari pertama kelahirannya hingga saat ini menurut Nurcholis Madjid (2008: 537) selalu diwarni dengan proses akulturasi timbal balik. Ketika dakwah Islam hadir dalam suatu pola tertentu, suatu kali Islam, Islam memberikan corak dominan

dalam budaya ini, dan pada saat yang lain budaya ini memberikan warna terhadap pemahaman Islam tertentu. Dari sini kemudian lahirlah akulturasi dan kulturisasi, ketika Islam menginspirasi untuk membentuk suatu model budaya baru dari budaya lokal yang telah ada. Sehingga sekalipun Islam itu tunggal, namun wujudnya dapat bermacam-macam, dan kesemuanya itu tidak bisa dianggap tidak orisinal.

Selain itu, menurut mazhab ini Islam tidak boleh didakwahkan kecuali dengan karakter yang *indigenous*, artinya kedatangan Islam pada suatu lokasi harus dihadirkan dengan pendekatan yang familier. Hal ini didasarkan pada sejarah dakwah para Rasul tidak pernah lepas dari dialog dengan kultur setempat dimana mereka diutus. Dengan mengutip firman Allah QS. Ibrahim/14:4:

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه

“...dan tidak kami utus seorang Rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya...”,

Mereka menafsirkan kata *lisanu qaumihi* sebagai budaya lokal suatu kaum atau adat istiadat setempat termasuk bahasa.

Dakwah yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan. *Pertama*, kehadiran dakwah Islam tidak dipandang sebagai ancaman bagi eksistensi budaya lokal. *Kedua*, dengan menerima dakwah Islam, tidak berarti suatu kaum terputus dari tradisi masa lampunya. *Ketiga*, universalisme Islam tidak hanya dianggap sebagai wacana, karena kehadiran Islam tidak dirasakan sebagai sesuatu yang lain, tetapi bagian

integral dengan budaya lokal.

Berbagai paradigma yang mewarnai proses pelaksanaan dakwah di atas memberikan pemahaman bahwa telah dirumuskan dan dicari metode yang tepat untuk memaksimalkan pelaksanaan dakwah yang disesuaikan dengan masyarakat dan era nya. Dakwah di era globalisasi, menurut penulis perlu adanya revitalisasi guna menjawab dan menyempurnakan aktivitas dakwah yang selama ini dilaksanakan. Konsepsi tersebut sebagai upaya membangun paradigma baru di era globalisasi sekarang ini, yaitu perlu adanya *revitalisasi* dakwah yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Dakwah Islam dengan pendekatan kultural hadir untuk mengukuhkan kearifan lokal yang ada pada suatu pola budaya tertentu, dengan cara memisahkan unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan memberikan inspirasi inovatif. Dengan pendekatan kultural ini menurut Jhon L. Esposito (2002: 263) hadirnya dakwah Islam bukan hanya akan menumbuhkembangkan budaya lokal, tetapi menyadari rasa butuh yang ada pada setiap sanubari manusia terhadap wahyu dan petunjuk Ilahi. Wewenang dakwah untuk menyeru ke jalan Tuhan juga meliputi wilayah pengembangan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana dakwah juga berperan dalam mengakomodasi kearifan-kearifan lokal dalam kerangka sistem moral Islam (akulturasi), atau justru menginspirasi dalam pembentukan kearifan tradisi baru yang diterima oleh tradisi setempat (kulturasasi).

Di era globalisasi ini dakwah tidak hanya dimaknai sebagai pentransferan ilmu pengetahuan oleh da'i kepada mad'u saja tetapi harus lebih

ditekankan pada dakwah yang bernuansa populis yaitu kepada mad'u untuk mad'u dan oleh mad'u. Artinya dakwah dapat dimaknai dengan memposisikan da'i sebagai "pendamping" mad'u (masyarakat) bukan sebagai satu-satunya orang yang memiliki potensi atau keahlian disetiap unsur kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.

Gerakan populis ini sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dengan senantiasa bersabda "*carilah aku di tengah-tengah komunitas fakir*". Suatu pernyataan yang sangat indah dimana wujud kekinian disebut dakwah dengan pola "pendampingan". Dalam kosa kata Islam *mustad'afin* memiliki nuansa yang sama dengan konsep "*the last first*" karya Robert Chambers (dalam Halim, 2001: 16) dalam karya *Putting The Last First* yang berarti golongan yang lemah, terutama dalam segi ekonomi. Karena itulah dasar filosofis dalam dakwah pendampingan adalah "*help people to help them self*" (membantu masyarakat untuk dapat membantu dirinya sendiri).

Pemahaman seperti di atas didasarkan pada rasionalitas bahwa setiap masyarakat memiliki potensi membangun dirinya sendiri dan mengetahui kebutuhan yang diperlukan untuk masyarakatnya, tentunya tidak mengesampingkan kearifan lokal yang dimiliki tiap-tiap wilayah. Kearifan lokal dalam pandangan John Haba (2007: 11) adalah sebuah kebudayaan yang mengacu pada pelbagai kebudayaan yang mengacu pada kekayaan budaya itu sendiri, yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat, dikenali, dipercayai, diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial diantara warga masyarakat.

Dengan memperhatikan berbagai adat-kebiasaan masyarakat, dakwah di era global hendaknya menyelaraskan kearifan-kearifan lokal yang ada dengan pola-pola dakwah yang sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka merubah dan mencari solusi yang tepat di suatu wilayah. Dengan memperhatikan kearifan lokal pada suatu masyarakat maka akan didapatkan formulasi yang tepat. Suatu masyarakat memiliki elemen perekat lintas warga yang tidak bersifat memaksa, tetapi berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan sekaligus untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal. Dalam prakteknya, peran da'i hanya memberikan pendampingan terhadap masyarakat (mad'u) saja dengan langkah-langkah dan solusi yang telah dipilih bersama.

Dakwah dengan tanpa berorientasi kepada persoalan-persoalan lokal, hanya akan menjadi tontonan. Bisa saja menarik namun bisa juga membosankan. Dalam sejarah, keberhasilan da'i mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai Islam, terlihat bagaimana para da'i itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat dimana dia melaksanakan dakwahnya. Rasulullah sendiri melaksanakan dakwahnya dengan sangat kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dimana beliau tinggal.

Paradigma baru dalam dakwah, selain memberikan penguatan pada kearifan local (*local wisdom*), sebagai basis kekuatan setiap individu dalam menghadapi dan mengatasi persoalan-persoalan baru sebagai akibat deras nya arus informasi dan komunikasi dari kekuatan – kekuatan global. Tentu dengan nilai-nilai baru yang ditawarkan, baik yang positif maupun negatif.

Secara struktural, masyarakat perlu di-*backup* melalui pengembangan struktur kelembagaan yang bisa dikembangkan oleh masing-masing daerah. Fungsi struktur kelembagaan ini diharapkan bisa memberikan dukungan, pengembangan *capacity buiding*, membuka ruang dialog antar anggota masyarakat, sehingga secara kolektif akan terbangun kekuatan kolektif dalam menyikapi, dan mengembangkan nilai-nilai budaya masyarakat. Solodaritas kolektif perlu dioptimalkan kembali, karena kecenderungan masyarakat yang semakin modern dengan meminjam istilah dari Emile Durkheim disebut solidaritas mekanis. Solidaritas mekanis menggambarkan ikatan relasi sosial dalam masyarakat didasarkan atas kepentingan dan tujuan tertentu. Sehingga kekuatan masyarakat akan terbagi dalam sejumlah kekuatan-kekuatan kecil, dan akan tumpul ketika menghadapi kekuatan-kekuatan global yang merasuk ke tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini.

Melalui dakwah diharapkan masyarakat kembali menghidupkan solidaritas organis. Solidaritas ini menekankan dasar ikatan dan relasi sosial adalah rasa kesetiakawanan sebagai sesama manusia, tanpa memikirkan dan mengharapkan pertukuran sosial yang bersifat untung rugi (*cost and benefit*) sebagaimana pada solidaritas mekanik pada masyarakat modern.

C. LANDASAN TEORI

Pada hakikatnya, teori merupakan seperangkat konsep, defenisi dan reposisi, yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena atas realitas sosial. Teori digunakan baik untuk menggambarkan yang seharusnya maupun menjelaskan

yang senyatanya secara empirik. Untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi sebagaimana yang berlaku dalam kenyataan, teori harus melaksanakan fungsi ganda. *Pertama*, menjelaskan fakta yang sudah diketahui, dan *kedua*; membuka celah pandangan baru untuk menemukan fakta baru pula. Bila kejadian yang sama ditafsirkan dalam konteks teoritik berbeda, akan muncul jenis-jenis fakta yang berlainan pula (Kaplan, 2002:15). Dengan demikian, diperlukan beberapa teori yang relevan dan dipergunakan dalam penelitian ini dalam menjelaskan kenyataan empirik tersebut, yaitu teori hegemoni dan teori adaptasi.

1. Teori Hegemoni

Dalam membahas teori perubahan sosial, Mansour Faqih (2001: 11) memberikan pemahaman kepada kita tentang teori perubahan sosial yang disinonimkan dengan teori pembangunan. Teori ini memberikan penekanan munculnya dominasi mengenai perubahan sosial. Pembangunan sebagai salah satu teori perubahan sosial merupakan fenomena luar biasa, karena sebuah teori mendominasi dan mempengaruhi umat manusia secara global, terutama di bagian dunia yang disebut “dunia ketiga”. Gagasan dan teori pembangunan bagi banyak orang mirip dengan “agama baru” yang menjanjikan harapan baru untuk memecahkan masalah-masalah kemiskinan, dan keterbelakangan bagi berjuta-juta rakyat di dunia ketiga.

Terkait dengan studi mengenai gerakan sosial dan perubahan sosial, muncul konsep yang diusung oleh Antonio Gramsci untuk membedah atau memahami berbagai cara dimana pranata masyarakat sipil membentuk persepsi tentang realitas sosial. Bagi Gramsci hegemoni adalah bentuk kontrol

dan kekuasaan yang sangat penting. Dengan demikian kekuasaan hegemonik lebih merupakan kekuasaan melalui “persetujuan”, yang mencakup beberapa jenis penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial politik yang ada.

Menurut Williams (dalam Faqih, 2000: 56) secara praktis hegemoni didefinisikan:

“Suatu tatanan di mana cara hidup dan pemikiran kelompok tertentu menjadi dominan, di mana satu konsep realitas disebarkan ke seluruh masyarakat dalam seluruh kelembagaan dan kehidupan pribadinya, yang mempengaruhi seluruh citarasa, moralitas, kebiasaan, prinsip-prinsip agama dan politik, dan seluruh hubungan sosial, terutama dalam pengertian intelektual dan moral”.

Sedangkan Bennet dalam Tester (dalam Faqih, 2003: 29) memberikan definisi kelas yang berkuasa mampu mensubordinasi kelompok sosial supaya menyetujui hubungan yang ada, dan ia akan melakukannya dengan menawarkan harga kepada kelompok subordinan. Apa yang disetujui sebenarnya adalah hasil negosiasi dari ideologi dan budaya kelas yang berkuasa. Konsep hegemoni di atas sangat jelas menunjukkan bahwa ada paling sedikit dua pihak yang terlibat dalam suatu masalah, sebagai pihak yang menghegemoni dan pihak yang terhegemoni tanpa memberi batasan dalam konteks apa hegemoni tersebut berlangsung, sehingga hegemoni dapat terjadi dalam bidang apapun.

Definisi Williams dan Bennet di atas membantu memberikan pemahaman tentang teori hegemoni Gramsci. Karena Gramsci sendiri tidak memberikan definisi dengan jelas dalam tulisan-tulisannya. Walaupun hegemoni diperoleh melalui persetujuan dan penggunaan paksaan oleh satu

kelas atas yang lainnya, persetujuan dalam proses hegemonik memainkan perannya secara *krusial*. Hegemoni dibakukan melalui banyak cara dimana pranata masyarakat sipil membentuk tatanan dan persepsi tentang realitas sosial.

Menurut Femia dalam Mansour Faqih (2000: 57), gagasan Gramsci tentang hegemoni menitikberatkan pada superfisialitas persetujuan di dalam sistem kapitalis mencakup bentuk komitmen aktif maupun pasif. Persetujuan sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Gramsci, merupakan ungkapan intelektual dan arah moral melalui perasaan massa secara tetap terikat dengan ideologi dan kepemimpinan politik negara sebagai ungkapan keyakinan dan aspirasinya. Bagi Gramsci pendidikan, kultur dan kesadaran adalah daerah perjuangan yang sangat penting, karena inti perubahan sosial bagi Gramsci adalah bentuk kekuasaan kelompok dominan yang digunakan untuk membentuk kesadaran kelompok subordinat.

Penggunaan analisis hegemoni dalam kajian ini erat hubungannya dengan globalisasi dengan berbagai bentuknya. Penetrasi yang begitu kuat memberikan *impact* terhadap adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Munculnya hegemoni globalisasi dari negara-negara maju terhadap negara berkembang secara tidak langsung memberikan paksaan (*coercion*) nilai-nilai lokal (baca: negara maju) untuk diaplikasikan terhadap berbagai adat-kebiasaan suatu daerah atau negara, dengan menggunakan media massa sebagai aspek dan penggerak dari sarana perluasan globalisasi.

Hubungan antara media dan globalisasi merupakan *mutual*

relationship. Hubungan antara keduanya digambarkan oleh Marshall McLuhan dengan metafora “*medium is the message*” dan “*global village*”. Media dan kemampuannya, menurut Rantanen (Saepudin, 2013) telah menjadikannya sebagai sarana penyampaian pesan, dan sarana penghubung antara satu dengan lainnya seakan-akan dalam satu wilayah yang sama. Di sini, media berperan sebagai *worldwide social relations*. Sehingga globalisasi yang diperankan oleh media, lebih bersifat *mediated*. Ini kemudian menciptakan fenomena yang disebut sebagai *mediated globalization*, artinya proses globalisasi ditingkatkan dan dikembangkan oleh media dan komunikasi. Akibatnya berbagai *image* yang melekat pada identitas kultural masyarakat berangsur-angsur tergerus dan digantikan oleh budaya dan nilai-nilai serta ideologi baru dari luar yang dikemas melalui media. Para pakar budaya khususnya penganut Marxist, mengkhawatirkan fenomena globalisasi ini sebagai bentuk hegemoni kuasa kapitalis menyebar ke berbagai dunia, dan mempersulit kemungkinan-kemungkinan keadilan dalam dunia kerja. Globalisasi telah membuka gerbang bagi perusahaan-perusahaan besar dunia untuk melebarkan jaringan kuasa ekonomi mereka, menembus batas geografis.

Dalam berinteraksi antara masyarakat lokal dan eksternal terjalin dengan membawa aliran berbagai produk kebudayaan baik materiil maupun non materiil. Proses ini terjadi dari satu negara satu ke negara lain dimulai dari wilayah regional hingga meluas secara global. Hegemoni budaya global terjadi melalui perluasan nilai-nilai, kebiasaan suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya dengan kemasan sangat menarik. Globalisasi menciptakan suatu

keadaan di mana budaya baru atau modern dengan berbagai standar dan pencitraanya, sangat diperlukan oleh masyarakat. Sehingga semua lapisan masyarakat merasa sangat membutuhkan untuk menerapkan nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupan umum mereka, hingga kehidupan pribadi sekalipun. Dalam kondisi seperti ini masyarakat tidak merasa bahwa nilai yang mereka tiru merupakan konstruksi dominasi suatu sistem terhadap sistem yang lainnya.

Kehadiran nilai-nilai dan budaya baru tersebut pada awalnya mengalami pertentangan namun lambat laun dapat ditolelir masyarakat sehingga dapat diterima sebagai budaya baru yang dianggap lebih baik dari sebelumnya. Dampaknya, sistem nilai suatu masyarakat yang sudah mapan secara turun-temurun, terkena arus budaya globalisasi dan sistem nilai baru yang belum tentu mampu memberikan tatanan yang lebih baik.

Dalam kondisi seperti ini, maka diperlukan suatu usaha untuk membendung hegemoni budaya globalisasi karena bagaimanapun proses hegemoni ini tidak dapat kita hindari. Namun kita bisa untuk tetap menyesuaikan (adaptasi) dengan berbagai nilai baru yang tidak dapat kita hindari. Adaptasi ini dilakukan masyarakat untuk mempertahankan eksistensinya menghadapi nilai-nilai yang di bawa oleh globalisasi. Bentuknya merujuk pada usaha penyesuaian produk budaya eksternal terhadap nilai, norma atau sistem kepercayaan yang dianut masyarakat lokal.

2. Teori Adaptasi

Adaptasi merupakan salah satu konsep dasar dalam antropologi ekologi. Dalam hal ini adaptasi menunjukkan pada proses terjadinya timbal balik antara

mahluk hidup dan lingkungannya (Kaplan, 2002: 112). Proses sirkularitas (saling-umpan-balik antara budaya dengan lingkungan) menjadi titik tekan dalam orientasi ekologi-budaya. Menurut Kaplan budaya dan lingkungan berinteraksi dalam suatu sistem tunggal, namun bukan berarti pengaruh kausal dari budaya ke lingkungan sama besar dengan pengaruh lingkungan terhadap budaya. Seiring kemajuan teknologi maka faktor dinamik dalam kepaduan budaya dan lingkungan makin lama makin didominasi oleh budaya bukan lingkungan sebagai lingkungan itu sendiri.

Menurut Alland dalam Oekan Soekotjo Abdoellah (1997: 52) adaptasi merupakan strategi yang digunakan oleh manusia dalam masa hidupnya untuk mengantisipasi perubahan lingkungan baik fisik maupun sosial. Sebagai proses dalam mengatasi perubahan tersebut, hal ini dapat berakhir dengan sesuatu yang diharapkan atau tidak diharapkan. Kapasitas manusia untuk beradaptasi ditunjukkan dengan usahanya untuk mencoba mengelola dan bertahan dalam kondisi lingkungannya.

Kemampuan suatu individu untuk beradaptasi, mempunyai nilai dalam kelangsungan hidupnya. Makin besar kemampuan beradaptasi suatu makhluk hidup semakin besar pula eksistensi kelangsungan makhluk hidup tersebut. Dengan demikian adaptasi merupakan suatu proses dimana individu berusaha untuk memaksimalkan kemampuan hidupnya. Untuk Sahlin—seperti juga Anderson (dalam Abdullah, 1997: 52) adaptasi merupakan suatu proses kompromi yang berlanjut dan tidak akan pernah berakhir dengan kesempurnaan. Adaptasi merupakan suatu proses yang sangat dinamis, karena

lingkungan dan populasi manusia selalu berubah.

Ting-Toomey (dalam Saepudin, 2013) mengatakan bahwa proses adaptasi akan dipengaruhi beberapa faktor, antara lain *pertama* keadaan sosio-ekonomi. Ketika pendatang berasal dari *background* sosial ekonomi tinggi, dan mampu memberikan dampak positif secara sosial-ekonomi, maka masyarakat lokal akan bertoleransi bahkan ramah terhadap pendatang. Tetapi sebaliknya, ketika masyarakat lokal menganggapnya sebagai masalah dan mengancam terhadap posisi serta keadaan sosial ekonominya, maka masyarakat akan menolaknya. *Kedua*, sikap mental. Budaya yang *assimilationist* akan sangat mengharapkan pendatang untuk menyesuaikan dengan budaya dan lingkungan lokal.

Berbeda dengan karakteristik budaya *assimilationist*, budaya *pluralist* justru menghargai perbedaan-perbedaan. Dalam budaya ini pendatang baru baru justru diberi kebebasan untuk menerapkan norma mereka. *Ketiga*, institusi lokal seperti institusi pendidikan, tempat kerja, layanan sosial dan media massa. Semua institusi ini menyediakan fasilitas kepada pendatang untuk melakukan adaptasi atau justru menghalangi proses tersebut. Selain institusi di atas, kebijakan negara, institusi lokal juga ikut berperan dalam proses ini melalui program-program dan peraturan-peraturan pemerintah. *Keempat*, pendefinisian masyarakat lokal terhadap pendatang. *Kelima*, jarak budaya. Jarak budaya merujuk kepada tingkat penyesuaian psikologis yang diperlukan untuk menjembatani perbedaan antara budaya asli dan budaya sasaran. Jarak budaya meliputi, dimensi perbedaan nilai budaya, konsep diri, bahasa dan gaya

komunikasi, agama sistem, ekonomi dan politik. Gabungan antara faktor-faktor yang disebutkan di atas, akan menciptakan iklim yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi pendatang baru.

Dalam pandangan Spradley (1972:241) proses adaptasi dipengaruhi oleh persepsi dan interpretasi seseorang terhadap suatu objek yang selanjutnya menuju sistem kategorisasi dalam bentuk respons atas kompleksitas suatu lingkungan. Sistem kategorisasi ini memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan yang sesuai untuk diadaptasikan, memberi arah bagi perilaku mereka sehingga memungkinkannya dapat mengantisipasi peristiwa yang akan datang. Proses adaptasi ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga level, yaitu *behavioral*, *psicological*, dan *genetic/demographic*, masing-masing level memiliki wilayah dan strateginya tersendiri, berdasarkan model lingkungan yang dihadapi.

Dari berbagai aspek kajian mengenai globalisasi, budaya merupakan aspek menarik untuk dikaji. Budaya merupakan sistem dari pola-pola tingkah laku dan berfikir yang diturunkan secara sosial, serta menghubungkan komunitas manusia dengan lingkungan-ekologi mereka. Konsep budaya turun menjadi tingkah laku yang terikat kepada kelompok-kelompok tertentu yaitu menjadi “adat istiadat” (*custom*) atau “cara kehidupan” (*way of life*) manusia (Saepudin, 2013)

3. Teori Perubahan Sosial

Dari berbagai konsep di atas, menunjukkan adanya korelasi antara berbagai konsep dengan fokus kajian ini. Eksistensi globalisasi memberikan dampak terhadap unsur-unsur yang terkait di dalam masyarakat. *Impact* dari

berbagai ketimpangan sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat disebabkan merasuknya nilai-nilai global yang dibawa globalisasi melalui berbagai teknologi informasi dan komunikasi. Satu sisi harus diakui bahwa dampak positif sudah dirasakan masyarakat, namun di sisi lain dampak dari globalisasi merupakan ancaman bagi budaya asli dalam lokalitas masyarakat.

Perubahan sosial bukanlah sebuah proses yang terjadi dengan sendirinya. *Impact* pergeseran di masyarakat itu tidak hanya terletak pada faktor dari luar atau *external* (baca: globalisasi yang disebarkan negara maju) saja, tetapi faktor dari dalam atau *internal* juga ikut berperan dalam mendukung perubahan (Soelaiman, 1998:120). Ada beberapa faktor yang berkontribusi memunculkan perubahan sosial (Martono, 2011: 16-23)

Pertama, faktor dari luar yang menjadi perubahan masyarakat yaitu:

- Adanya penetrasi dari kebudayaan luar, sehingga terjadi penyerapan budaya baik melalui interaksi sosial kemasyarakatan, dari pemerintah (penguasa) maupun pengaruh teknologi. Benturan kebudayaan seringkali terjadi jika terdapat dua kebudayaan atau lebih yang bertemu. Dalam prosesnya kemudian muncul peniruan atau imitasi budaya, misalnya dalam bentuk bahasa, *life style*, mode, cara pandang dalam mensikapi fenomena dan lain-lainnya.
- Terjadi bencana alam atau berubahnya kondisi lingkungan fisik. Kondisi ini terkadang memaksa masyarakat suatu daerah untuk berpindah tempat atau mengungsi untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Apabila masyarakat tersebut mendiami lingkungan baru, maka harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan setempat. Hal ini dapat dimungkinkan

dapat mempengaruhi perubahan pada struktur dan pola kelembagaannya. Disisi lain, pembangunan sarana fisik juga sangat mempengaruhi perubahan aktifitas masyarakat. Salah satunya adalah terbukanya kesempatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terisolir untuk “membuka diri” dan menikmati berbagai fasilitas yang berada di luar daerahnya.

- Peperangan. Peristiwa peperangan baik perang saudara atau antar negara akan menyebabkan perubahan sosial, karena pihak yang menang akan dapat memaksakan ideologi dan kebudayaannya kepada pihak yang kalah.
- Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain . Adanya interaksi antara dua kebudayaan yang berbeda akan menghasilkan perubahan. Jika pengaruh suatu kebudayaan dapat diterima tanpa paksaan, maka disebut *demonstration effect*. Jika pengaruh kebudayaan saling menolak, maka disebut *cultural animosity*. Jika suatu kebudayaan memiliki taraf kebudayaan yang lebih tinggi dari kebudayaan lain, maka akan muncul proses imitasi yang lambat laun unsur-unsur kebudayaan asli dapat bergeser atau diganti dengan unsur-unsur kebudayaan baru tersebut.

Kedua, faktor *internal* atau penyebab dari dalam meliputi :

- Aspek *demografi* (bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk). Pertambahan jumlah penduduk akan menyebabkan perubahan dan jumlah penyebaran wilayah pemukiman. Wilayah pemukiman yang semula berpusat pada satu wilayah kekerabatan (misalnya desa) akan berubah atau terpancar karena faktor pekerjaan. Berkurangnya penduduk juga akan menyebabkan perubahan sosial budaya.

- Penemuan-penemuan baru (*inovasi*). Penemuan baru yang berupa teknologi dapat mengubah cara individu berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan teknologi dapat mengurangi jumlah kebutuhan tenaga kerja di sektor industri karena tenagamanusia telah digantikan oleh mesin yang menyebabkan proses produksi semakin efektif dan efisien.
- Pertentangan dan konflik. Proses perubahan sosial bisa terjadi sebagai akibat adanya konflik sosial dalam masyarakat. Konflik sosial bisa terjadi manakala ada perbedaan kepentingan atau terjadi ketimpangan sosial. Sebagaimana diketahui ketimpangan sosial akan dapat ditemui di setiap masyarakat, hal ini disebabkan karena setiap individu memiliki kemampuan yang tidak sama dalam meraih sumber daya yang ada. Perbedaan kepentingan akan menyebabkan berbagai konflik sosial misalnya antara penguasa dan rakyat yang memiliki pandangan yang berbeda. Konflik-konflik sosial tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menghasilkan perubahan sosial, sebagai contoh pergantian penguasa, akomodasi antara pihak-pihak yang bertikai , serta munculnya berbagai kesepakatan atau peraturan baru .
- Pemberontakan atau revolusi. Faktor ini terkait dengan faktor sebelumnya yaitu konflik sosial. Munculnya konflik sosial akan mengakibatkan perubahan sosial karena adanya tuntutan. Para pemberontak melakukan tuntutan yang berimbas pada lumpuhnya kegiatan ekonomi, pergantian kekuasaan dan lain sebagainya.

- Selain itu faktor kematian dan kelahiran penduduk , migrasi, akan berpengaruh langsung terhadap struktur masyarakat terutama lembaga kemasyarakatannya.

Selain faktor tersebut, terdapat faktor lain yang dapat mendorong dan menghambat proses perubahan Sosial. Adapun faktor yang mendorong proses perubahan sosial adalah: *pertama* kontak dengan budaya lain. Bertemunya budaya yang berbeda-beda menyebabkan manusia saling berinteraksi dan mampu menghimpun berbagai penemuan yang telah dihasilkan, baik dari budaya asli maupun budaya asing, dan bahkan dari perpaduannya. Hal ini dapat mendorong terjadinya perubahan dan tentunya akan memperkaya kebudayaan yang ada. *Kedua*, Sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mengukur tingkat kemajuan masyarakat. Pendidikan telah membuka pikiran dan membiasakan berpola pikir ilmiah, rasional dan objektif. Hal ini akan memberikan kemampuan manusia untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya mampu memenuhi tuntutan perkembangan zaman, dan merupakan sebuah perubahan atau tidak. *Ketiga*, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Sebuah hasil karya dapat memacu orang lain untuk mengikuti suatu jejak. Orang yang berkeinginan untuk maju selalu terpacu untuk mengembangkan diri. *Keempat*, adanya toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Penyimpangan sosial sejauh tidak melanggar hukum, dapat menjadikan cikal bakal terjadinya perubahan sosial. *Kelima*, sistem stratifikasi masyarakat terbuka (*open stratification*). Sistem ini memungkinkan adanya gerak sosial vertikal atau horizontal yang lebih luas kepada anggota masyarakat. Masyarakat tidak lagi mempersoalkan status social dalam menjalin hubungan

dengan sesamanya. Hal ini memberikesempatan pada individu untuk dapat mengembangkan kemampuan dirinya. *Keenam*, penduduk yang heterogen. Masyarakat heterogen dengan latar belakang budaya, ras dan ideologi yang berbeda akan mudah terjadi pertentangan yang dapat mengakibatkan kegoncangan social. *Ketujuh*, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Ketidakpuasan menimbulkan reaksi berupa perlawanan, pertentangan dan berbagai gerakan revolusi untuk mengubahnya. *Kedelapan*, Adanya orientasi masa depan. Pemikiran yang selalu berorientasi masa depan akan membuat masyarakat selalu berpikir maju dan mendorong terciptanya penemuan-penemuan baru yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. *Kesembilan*, Adanya nilai bahwa manusia harus selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Usaha merupakan faktor keharusan bagi manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.

Perubahan sosial budaya pada hakekatnya merupakan manifestasi dari segala permasalahan yang berhubungan dengan penerimaan cara-cara baru, atau suatu perubahan terhadap berbagai cara hidup manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Kebudayaan menyangkut berbagai pola dan cara berfikir manusia, serta tingkah laku sebagai *feed back* dari interaksi komunikasi yang muncul baik secara simbolis maupun empiris bukan karena warisan biologis.

Perubahan sosial menurut Selo Sumardjan (dalam Yulianti, 2003:123) merupakan variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik disebabkan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, difusi maupun penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial terjadi bukan saja bersifat material tetapi juga immaterial. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada

lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Dalam kebudayaan aspek material maupun non material merupakan faktor yang selalu bersinggungan dalam berbagai perubahan tidak terkecuali perubahan teknologi. Menurut Ogburn (dalam Soelaiman, 1998:115) perubahan teknologi menyebabkan perubahan lingkungan material, sehingga menimbulkan perubahan atau terjadi modifikasi kebiasaan-kebiasaan dan kelaziman yang umum dalam masyarakat serta pada lembaga sosial. Ogburn menawarkan konsep analisis kebudayaan yang disebut "*cultural lag*", dia menjelaskan bahwa kebudayaan dibagi dua kategori yaitu material dan non material. Keduanya mendorong terjadinya perubahan dan saling berpacu dalam proses terjadinya perubahan. Biasanya perubahan material mengawali suatu perubahan yang kemudian diiringi perubahan non material kemudian. Perubahan kebudayaan material adalah faktor utama yang menyebabkan perubahan non material. Perubahan non material lebih lambat dalam penyesuaian bentuknya, atau perubahan tidak selalu sama cepatnya dalam keseluruhannya, akan tetapi ada bagian yang tumbuh lebih cepat dibanding bagian yang lainnya. Bagian-bagian tersebut saling berhubungan saling tergantung, keadaan demikian ini lah oleh Ogburn disebut "*cultural lag*".

Proses perubahan sosial menurut Soekanto (1999: 343-344) dapat diketahui dari beberapa ciri-cirinya sebagai berikut; *Pertama*, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap masyarakat mengalami perubahan secara lambat maupun cepat. *Kedua*, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga sosial yang lainnya. *Ketiga*, perubahan yang berlangsung sangat cepat biasanya mengakibatkan

disorganisasi karena dalam masyarakat ada proses penyesuaian diri atau adaptasi. Disorganisasi yang diikuti oleh proses reorganisasi akan menghasilkan pemantapan kaidah-kaidah dan nilai yang baru. *Keempat*, Suatu perubahan tidak dapat dibatasi pada aspek kebendaan atau spiritual saja karena keduanya mempunyai kaitan timbal balik yang kuat. *Kelima*, secara tipologis, perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai; 1) Proses sosial yang menyangkut sirkulasi atau rotasi ganjaran fasilitas-fasilitas dan individu yang menempati posisi tertentu pada suatu struktur. 2) Segmentasi, yaitu keberadaan unit-unit secara struktural tidak berbeda secara kualitatif dari keberadaan dari masing-masing unit-unit tersebut. 3) Perubahan struktural, yaitu munculnya kompleksitas baru secara kualitatif mengenai peranan-peranan dan organisasi. 4) Perubahan dalam struktur kelompok, yaitu perubahan dalam komposisi kelompok, tingkat kesadaran kelompok dan hubungan-hubungan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Menurut Himes dan Moore dalam Soelaiman (Martono, 2011: 6-8), perubahan sosial memiliki tiga dimensi, yaitu: dimensi struktural, kultural dan interaksional. *Pertama*, dimensi struktural mengacu pada perubahan-perubahan yang mengacu pada bentuk struktur masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial, dan perubahan dalam lembaga sosial. *Kedua*, *dimensi kultural* mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat. Perubahan ini meliputi: 1). Inovasi kebudayaan. Merupakan komponen internal yang memunculkan perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Inovasi kebudayaan yang paling mudah ditemukan adalah munculnya teknologi baru. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks memaksa individu untuk berfikir kreatif dalam upaya untuk memenuhi

kebutuhannya. 2) Difusi, merupakan komponen eksternal yang mampu menggerakkan terjadinya perubahan sosial. 3) Integrasi, merupakan wujud perubahan budaya yang “relatif lebih halus”. Hal ini disebabkan adanya penyatuan unsur-unsur kebudayaan yang saling bertemu untuk kemudian memunculkan kebudayaan baru sebagai hasil penyatuan berbagai unsure-unsur kenudayaan tersebut.

Ketiga, dimensi interaksional, mengacu pada adanya perubahan hubungan sosial dalam masyarakat. Dimensi ini meliputi: 1) Perubahan dalam frekuensi. Perkembangan teknologi menyebabkan berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka. Semua kebutuhan untuk berinteraksi dapat dipenuhi dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya para orang tua tidak perlu mengantar uang bulanan anaknya yang sedang kuliah di luar kota untuk memenuhi kebutuhannya. Semua kebutuhan berinteraksi dengan mudah dapat digantikan dengan memanfaatkan teknologi. Fasilitas ATM (*Anjungan Tunai Mandiri*) atau teller di bank dapat menggantikan interaksi orang tua dengan anaknya secara langsung. Orang tua tidak susah payah harus keluar kota untuk mengirim segala kebutuhan yang dibutuhkan sang anak. 2) Perubahan dalam jarak sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser fungsi tatap muka dalam proses interaksi. Individu tidak harus bertatap muka ketika harus berkomunikasi dan interaksi secara langsung. Bahkan, ketika dua individu berada di tempat yang jaraknya ribuan kilo meter, tetap dapat melakukan komunikasi. 3) Perubahan perantara. Mekanisme kerja masyarakat modern banyak bersifat “*serba on line*”, menyebabkan individu tidak banyak membutuhkan “orang lain” dalam proses pengiriman informasi. Pada zaman dahulu seorang raja mengirim prajuritnya untuk

menyampaikan pesan ke kerajaan lain dengan memakan waktu lama. Di zaman modern, informasi antar negara dapat langsung disampaikan tanpa harus perantara.

4) Perubahan dari aturan atau pola-pola. Banyak aturan serta pola-pola yang mengalami banyak perubahan seiring perubahan masyarakat. Emansipasi dalam dunia kerja misalnya, telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap “perempuan yang pulang malam”. Bila sebelumnya perempuan yang keluar dan pulang malam dikonotasikan sebagai “perempuan nakal”, namun masyarakat sekarang memandang hal tersebut sebagai hal biasa karena pada saat sekarang banyak perempuan yang bekerja sampai larut malam bahkan bekerja pada malam hari.

5) Perubahan dalam bentuk interaksi. Interaksi antar individu atau kelompok saat ini tidak sekaku zaman dahulu yaitu harus bertatap muka. Di era sekarang interaksi dapat dilakukan kapan saja melalui *handphone*, *face book*, *twitter*, email dan sebagainya.